

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2023

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



✉ pawatampone1a@gmail.com
☎ 0481-21018
📍 Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A
Watampone Sulawesi Selatan, 92716
🌐 www.pa-watampone.go.id

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dengan baik, sesuai *time schedule* yang telah direncanakan.

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Watampone Kelas I A sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Laporan ini menggambarkan pelaksanaan setiap program dan kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A selama tahun 2023, meliputi keadaan perkara dan penyelesaian perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, serta pengawasan.

Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hakim, pejabat struktural dan fungsional, para pegawai serta tenaga honorer atas keterlibatan, kerja keras, dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan ini. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, namun atas kerjasama yang baik dari semua pihak, laporan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dengan demikian semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan tolak ukur serta evaluasi pekerjaan kami di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya.

Watampone, 5 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Watampone


Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

NIP. 19671231 199303 2 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA.....	6
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama.....	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	7
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	8
B. Penyelesaian Perkara.....	8
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	9
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	10
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	
Banding, Kasasi, dan PK.....	11
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi.....	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	12
1. Posbakum.....	13
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	14
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	16
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA.....	18
1. Mutasi.....	26
2. Promosi.....	27
3. Pensiun.....	27
4. Diklat.....	28
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI.....	36
A. Pengelolaan Keuangan.....	36
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	40

C. Pengelolaan Teknologi Informasi	46
1. Implementasi e-Court	46
2. Implementasi SIPP	50
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	53
A. Pembangunan Zona Integritas	53
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	54
C. Inovasi Pelayanan Publik	58
BAB VI PENGAWASAN	73
A. Internal	73
B. Evaluasi	75
BAB VII PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi	77
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1	Matrik Keadaan Perkara pada Wialayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023.....	6
Tabel 2.2	Jumlah Perkara yang diputus Tahun 2023.....	7
Tabel 2.3	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023.....	7
Tabel 2.4	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023..	8
Tabel 2.5	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023.....	8
Tabel 2.6	Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2022.....	9
Tabel 2.7	Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2022.....	9
Tabel 2.8	Rentang Waktu Penyelesaian Perkara.....	10
Tabel 2.9	Data Pelaksanaan Mediasi.....	12
Tabel 2.10	Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum).....	14
Tabel 2.11	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling.....	15
Tabel 2.12	Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu.....	16
Tabel 2.13	Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo.....	17

BAB III

Tabel 3.1	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan / Golongan.....	19
Tabel 3.2	Matrik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	21
Tabel 3.3	Daftar Mutasi Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone.....	26
Tabel 3.4	Daftar Promosi Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone.....	27
Tabel 3.5	Daftar Pensiun Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone.....	27
Tabel 3.6	Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2023.....	28

BAB IV

Tabel 4.1	Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2023	40
Tabel 4.2	Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone.....	41
Tabel 4.3	Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone	41
Tabel 4.4	Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone	42
Tabel 4.5	Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Watampone	43
Tabel 4.6	Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah.....	46
Tabel 4.7	Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023.....	48
Tabel 4.8	Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2023.....	49

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1	Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta.....	2
------------	--	---

BAB II

Gambar 2.1	Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara	11
------------	--	----

BAB III

Gambar 3.1	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	21
Gambar 3.2	Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir	24
Gambar 3.3	Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial	25
Gambar 3.4	Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial	25

BAB IV

Gambar 4.1	Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076.....	40
Gambar 4.2	Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone	51

BAB V

Gambar 5.1	Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI.....	59
Gambar 5.2	Tampilan Halaman Untuk Pengguna.....	60
Gambar 5.3	Tampilan Halaman untuk Admin.....	60
Gambar 5.4	Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU.....	61
Gambar 5.5	Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU.....	62
Gambar 5.6	Tampilan Bagian Home (Sebelum Login).....	63
Gambar 5.7	Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509.....	64
Gambar 5.8	Tampilan Dashboard (Setelah User Login).....	64
Gambar 5.9	Kursi Prioritas dan untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu	65
Gambar 5.10	Parkit Khusus Disabilitas.	66
Gambar 5.11	Tampilan Halaman Lacak Proses Tahapan Perkara.....	67
Gambar 5.12	Tampilan Halaman Buru Tamu Digital.....	68
Gambar 5.13	Tampilan Login Sistem Administrasi Kepegawaian.	70

Gambar 5.14	Sistem Administrasi Kepegawaian	71
Gambar 5.15	Tampilan Halaman Statistik Data SIPP.	72

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Watampone merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan berbiaya ringan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Watampone kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Ibukota kabupaten Bone adalah Watampone.



Gambar 1.1
Wilayah Kabupaten Bone dalam Peta

Secara geografis, kabupaten Bone berbatasan dengan :

- Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Timur : Teluk Bone
- Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis, kabupaten Bone terletak pada posisi $4^{\circ}13' - 5^{\circ}6'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ}42' - 120^{\circ}30'$ Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan kabupaten Bone beriklim tropis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 Vide Instelling Besluit Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pengadilan Agama Watampone beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, kelurahan Tibojong, kecamatan Tanete Riattang Timur, kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bone, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa / kelurahan.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah kabupaten Bone, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Watampone berfungsi menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Visi, Misi, dan Sasaran Strategis

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi Pengadilan Agama Watampone adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Watampone adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Watampone berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Watampone untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator :

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
 - d. Index kepuasan pencari keadilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Indikator :
- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Indikator :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
 - d. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Indikator : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB II
KEADAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SERTA PENINGKATAN
MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pada tahun 2022 terdapat 37 sisa perkara yang diproses di tahun 2023. Tabel berikut ini memperlihatkan keadaan perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 :

Tabel 2.1
Matrik Keadaan Perkara pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Cerai Gugat	1005	1018	20	33 sisa perkara tahun 2022 diputus
2	Cerai Talak	267	268	7	8 sisa perkara tahun 2022 diputus
3	Harta Bersama	9	5	5	1 sisa perkara tahun 2022 diputus
4	Kewarisan	8	4	4	
5	Pengangkatan Anak	16	16	0	
6	Pengesahan/Itsbat Nikah	506	515	1	10 sisa perkara tahun 2022 diputus
7	Dispensasi Kawin	28	29	0	1 sisa perkara tahun 2022 diputus
8	Wali Adhal	4	4	0	-
9	Perwalian	15	15	0	-

10	Penetapan Ahli Waris	47	48	0	1 sisa perkara tahun 2022 diputus
11	Poligami	0	0	0	-
12	Lain – lain	48	48	0	-
	TOTAL	1953	1970	37	

Tabel 2.2
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2023

No	Bulan	Perkara Putus	
		Permohonan	Gugatan
1	Januari	43	98
2	Februari	50	125
3	Maret	72	95
4	April	45	49
5	Mei	15	146
6	Juni	84	94
7	Juli	45	124
8	Agustus	49	93
9	September	61	108
10	Oktober	72	164
11	Nopember	45	113
12	Desember	41	139
	Total	622	1348

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 sebanyak 4 perkara, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

No.	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	199/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	17 Maret 2023	Putus, dikuatkanPutusan Tingkat Pertama

2	263/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	02 Agustus 2023	Putus, dikuatkanPutusan Tingkat Pertama
3	450/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	14 Agustus 2023	Putus, dikuatkanPutusan Tingkat Pertama
4	699/Pdt.G/2023/PA.Wtp.	07 September 2023	Putus, dikuatkanPutusan Tingkat Pertama

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2023, hanya terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Keterangan
1	780/Pdt.G/2022/PA.Wtp	27 Januari 2023	Putus Ditolak

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun 2023 tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Tabel 2.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran
1	NIHIL	-
	-	-

B. Penyelesaian Perkara

Tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Watampone sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara berdasarkan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya.

Berikut ini merupakan gambaran tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 :

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

a. Perkara Permohonan (Volunter)

Terdapat 1 sisa perkara Permohonan (Volunter) tahun 2022 yang diputus / diselesaikan di tahun 2023. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Sisa perkara Permohonan (Volunter) Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Pengesahan/Itsbat Nikah	1
2.	Dispensasi Kawin	0
3.	Penetapan Ahli Waris	0
4.	Lain – lain	0
Jumlah		1

b. Perkara Gugatan (Contentius)

Sisa perkara Gugatan tahun 2022 sebanyak 36 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sisa Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah Perkara
1.	Cerai Talak	7
2.	Cerai Gugat	20
3.	Harta Bersama	5
4.	Kewarisan	4
Jumlah		36

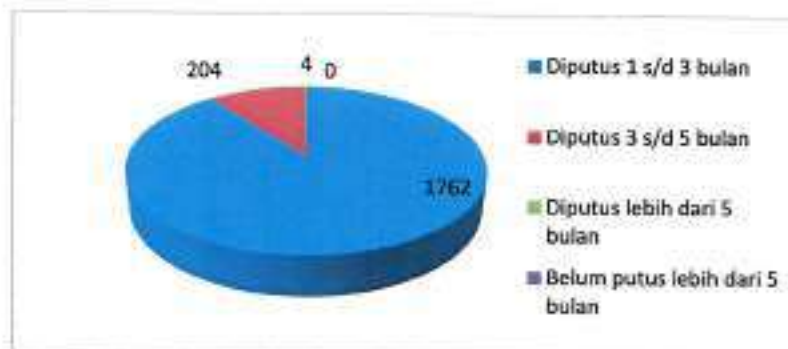
Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7, maka jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus / diselesaikan pada tahun 2023 adalah 37 perkara (1 + 36).

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Tabel 2.8
Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan				Ket.
		Diputus 1 s/d 3 bulan	Diputus 3 s/d 5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan	
1	Januari	121	20	0	0	
2	Februari	164	11	0	0	
3	Maret	167	0	0	0	
4	April	94	0	0	0	
5	Mei	115	46	0	0	
6	Juni	159	18	1	0	
7	Juli	147	21	1	0	
8	Agustus	134	8	0	0	
9	September	147	22	0	0	
10	Oktober	218	16	2	0	
11	Nopember	137	21	0	0	
12	Desember	159	21	0	0	
	Jumlah	1762	204	4	0	
	Total	1966		4	0	

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah perkara yang diputus tepat waktu (tidak lebih dari 5 bulan) pada tahun 2023 sebanyak 1.966 perkara.



Gambar 2.1
Diagram Rentang Waktu Penyelesaian Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Banding

Berdasarkan tabel 2.3, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 sebanyak 4 perkara, dari 1.970 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.966 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 99,79 %.

b. Kasasi

Berdasarkan tabel 2.4, jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara, dari 1.970 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 1.969 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 99,94 %.

c. Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 2.5, tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2023, dari 1.970 perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

sebanyak 1.970 perkara. Oleh sebab itu, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 100 %.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara, dan Pengadilan Agama Watampone tahun 2023 telah melaksanakan proses mediasi. Realisasi pelaksanaan mediasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Pelaksanaan Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil/gagal	Jumlah Perkara masih dalam proses
1	Januari	21	1	10	0
2	Februari	15	0	18	0
3	Maret	11	0	12	0
4	April	4	0	6	0
5	Mei	12	1	7	0
6	Juni	13	0	16	0
7	Juli	8	0	7	0
8	Agustus	19	1	14	0
9	September	13	0	15	0
10	Oktober	15	0	13	0
11	November	13	1	10	0
12	Desember	12	0	6	0
Jumlah		156	4	134	0

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi pada tahun 2023 hanya 4 perkara.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah salah satu standar dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

menetapkan diri untuk menerapkan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). SAPM diperlukan untuk mengukur profesionalitas dan transparansi organisasi / satuan kerja.

Suatu organisasi / satuan kerja yang mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat sudah semestinya mengikuti secara berkelanjutan program tersebut agar mencapai nilai yang lebih baik dan menciptakan keunggulan komparatif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Watampone senantiasa mengacu dan berpedoman pada sertifikasi SAPM yang telah disusun oleh Dirjen Badilag. Pengadilan Agama Watampone berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi kepada prinsip efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa pengadilan.

Berikut ini beberapa kegiatan unggulan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan, sebagaimana uraian kegiatan dalam Penetapan Kinerja, yaitu :

1. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan / permohonan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 30 Nopember 2022, Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) sebesar Rp 70.000.000,- (*enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dengan target 700 jam layanan, 500 orang. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan

melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki sesuai kontrak perjanjian kerjasama Nomor W20-A2/126/HM.01.1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Tabel 2.10
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No	Bulan	Jam Layanan	Serapan Anggaran	Jumlah Perkara Yang Terlayani
1	Januari	35	Rp. 0,-	78
2	Februari	63	Rp. 3.495.000,-	94
3	Maret	63	Rp. 6.291.000,-	82
4	April	35	Rp. 6.291.000,-	42
5	Mei	63	Rp. 3.495.000,-	133
6	Juni	63	Rp. 6.291.000,-	93
7	Juli	63	Rp. 6.291.000,-	114
8	Agustus	63	Rp. 6.291.000,-	89
9	September	63	Rp. 6.291.000,-	109
10	Oktober	63	Rp. 6.291.000,-	114
11	November	63	Rp. 6.291.000,-	95
12	Desember	63	Rp. 12.582.000,-	78
	Jumlah		Rp. 69.000.000,-	1.121

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 1.121 perkara yang terlayani dalam 700 Jam Layanan. Dengan demikian, realisasi kegiatan layanan PosBaKum sebesar 224,2 %, melebihi target.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

a. Sidang di luar gedung Pengadilan

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan atau biasa disebut (sidang keliling), khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.

Kegiatan sidang di luar gedung bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik dan geografis.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung sejumlah Rp 43.707.000,- (*empat puluh tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) dengan target 17 kegiatan.

Tabel 2.11
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Sibulue	2	14	Rp. 5.142.000,-
2	Lamuru	2	25	Rp. 5.142.000,-
3	Dua Boccoe	2	7	Rp. 5.142.000,-
4	Libureng	2	11	Rp. 5.142.000,-
5	Salomekko	3	14	Rp. 7.713.000,-
6	Ajangale	2	17	Rp. 5.142.000,-
7	Kahu	2	19	Rp. 5.142.000,-
8	Cenrana	1	11	Rp. 2.571.000,-
9	Barebbo	1	9	Rp. 2.571.000,-
	Total	17	127	Rp 43.707.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di luar gedung yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, menyidangkan 127 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 43.707.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling.

b. Sidang Pelayanan Terpadu

Sidang Pelayanan Terpadu yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam model Pelayanan Terpadu perkara

isbat nikah. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sidang Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran penyelenggaraan Pelayanan Sidang Terpadu (YanDu) sebesar Rp 50.400.000,- (*lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*) untuk 8 kegiatan.

Tabel 2.12
Pelaksanaan Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu

No	Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Serapan Anggaran
1	Kajua	1	29	Rp. 6.300.000,-
2	Libureng	1	31	Rp. 6.300.000,-
3	Barebbo	1	28	Rp. 6.300.000,-
4	Cina	1	17	Rp. 6.300.000,-
5	Amali	1	43	Rp. 6.300.000,-
6	Cenrana	2	22	Rp. 12.600.000,-
7	Ajangale	1	18	Rp. 6.300.000,-
	Total	8	188	Rp. 50.400.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 188 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 50.400.000,-. Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat Sidang Pelayanan Terpadu.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan

dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Pengadilan Agama Watampone mendapatkan alokasi anggaran perkara prodeo pada tahun 2023 sejumlah Rp 19.250.000,- (*Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan target 35 perkara.

Tabel 2.13
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

No	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Serapan Anggaran / Bulan
1	Januari	15	Rp. 4.220.000,-
2	Februari	2	Rp. 870.000,-
3	Maret	8	Rp. 1.470.000,-
4	April	3	Rp. 2.010.000,-
5	Mei	23	Rp. 5.360.000,-
6	Juni	19	Rp. 470.000,-
7	Juli	2	Rp. 1.130.000,-
8	Agustus	1	Rp. 2.410.000,-
9	September	15	Rp. 900.000,-
10	Oktober	-	Rp. -
11	Nopember	1	Rp. 407.000,-
12	Desember	-	Rp. -
	Jumlah	89	Rp. 19.247.000,-

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara prodeo yang terlayani pada tahun 2023 sebanyak 89 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 19.247.000,-. Semua perkara prodeo berhasil diselesaikan.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi suatu organisasi dan sangat menentukan keberhasilan tujuan organisasi tersebut. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, yang merupakan lembaga terhormat, peranan SDM tidak saja penting secara organisasi, tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis.

Untuk memperkuat fungsi organisasi pada Pengadilan Agama Watampone, dibutuhkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan profesional, terutama untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, kualitas SDM itu sendiri yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi Pengadilan Agama Watampone perlu diperkuat dan ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum, khususnya peradilan agama, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan.

Salah satu agenda implementasi reformasi birokrasi dalam penataan manajemen SDM. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas jabatan. Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik.

Secara umum, SDM peradilan dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah SDM teknis yudisial, terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Kelompok kedua adalah SDM non teknis yudisial, terdiri dari Sekretaris, Kasubbag, Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

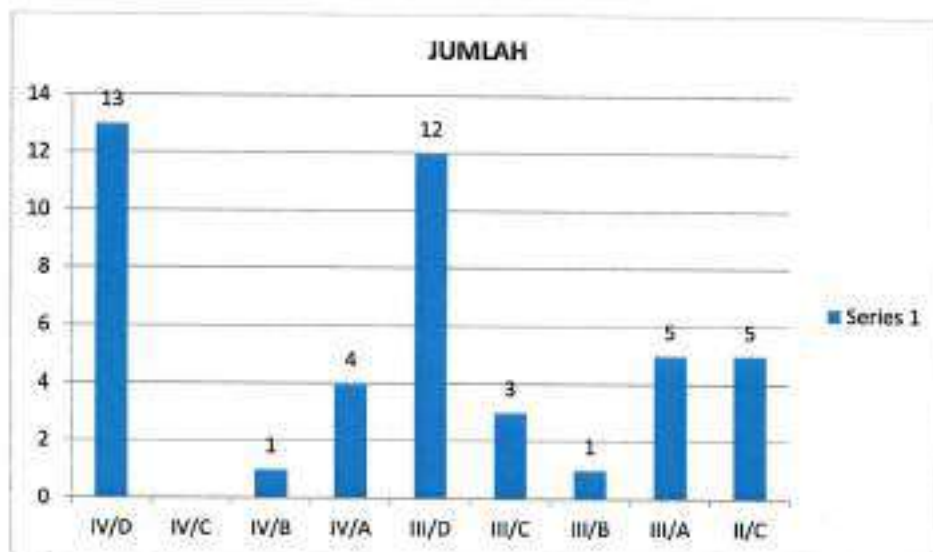
SDM yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 berjumlah 49 (empat puluh empat) orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Matrik Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kepangkatan / Golongan

No	Nama	Pangkat / Gol.	Jabatan
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
3	Drs. H.M. Yunus K.S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
4	Drs. Dasri Akil, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
5	Drs. H. M. Tang, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
6	Dra. H. Idris, M.H.I.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
7	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
8	Dra. Hj. St. Husnaenah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
9	Dra. Hj. Warni, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
10	Drs. H. Jabbar, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
11	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
12	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
13	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya, IV/d	Hakim
14	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Pembina Tk. I, IV/b Pembina, IV/a	Sekretaris
15	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
16	Lukman Patawari, S.H.	Pembina, IV/a	Panitera
17	Haris, S.H.I., M.Sy.	Pembina, IV/a	Panitera Pengganti
18	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

19	Dra. Hj. Rosmini,	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
20	Bintang, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda
21	Siti Jamila, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
22	Andi Suardi, S. Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda
23	Hj. Fitriani, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
24	Hj. Asmah, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana
25	Hayad Jusa, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Muda
26	Dra. Hj. Samsang,	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
27	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Penata Tk.I, III/d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
28	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I.	Penata Tk.I, III/d	Panitera Pengganti
29	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	Penata Tk.I, III/d	Penyusun Laporan Keuangan
30	Muhammad Syahrani, S.H.	Penata Tk.I, III/d	Juru Sita
31	Maryati M, S.H.	Penata III/c	Panitera Pengganti
32	Asril Amrah, S.H.I.	Penata III/c	Panitera Pengganti
33	Ridmajayanti, S.Sos.	Penata III/c	Juru Sita
34	Agustiawati, S.E., S.H.	Penata Muda Tk.I, III/b	Panitera Pengganti
35	Panggih Tridarma, S.Kom.	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
36	Breend Benny Dharmawan, S.E.	Penata Muda, III/a	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
37	Fathur Razak, S.Sy.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
38	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	Penata Muda, III/a	Analisis Perkara Peradilan
39	Nanni,	Penata Muda, III/a	Analisis Tata Laksana
40	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara
41	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Pengatur, II/c	Arsiparis Pelaksana
42	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengatur, II/c	Pengelola Perkara
43	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak	Pengatur, II/c	Pengelola Barang Milik Negara
44	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B	Pengatur, II/c	Pengelola perkara



Gambar 3.1

Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Tabel 3.2

Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Nama	Pendidikan Terakhir		Jabatan
		Tingkat Ijazah	Tempat Pendidikan	
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	S2	Universital 45 Makassar	Ketua
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	S2	UIN Alauddin Makassar	Wakil Ketua
3	Drs. H.M. YunusK, S.H., M.H.	S2	Universital 45 Makassar	Hakim
4	Drs. Dasri Akil, S.H.	SI	STIH Pengayoman Makassar	Hakim
5	Drs. H. M. Tang, M.H.	S2	Universitas Hasanuddin Makassar	Hakim
6	Dra. H. Idris, M.H.I.	S2	Insitut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang	Hakim
7	Dra. Hj. Sitti Johar, M.H.	S2	UNIVERSITAS MUSLIM	Hakim

			INDONESIA	
8	Dra.Hj.St.Husnaenah, M.H.	S2	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Hakim
9	Dra. Hj. Warni, M.H.	S2	Universitas Muslim Indonesia	Hakim
10	Drs. H. Jabbar, M.H	S2	UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR	Hakim
11	Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.	S1	UNIVERSITAS CENDERAWASI H	Hakim
12	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	S1	FAKULTAS HUKUM UNSAT MAKASSAR	Hakim
13	Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H	S2	Universitas 45 Makassar	Hakim
14	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	S2	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Sekretaris
15	Lukman Patawari, S.H.	S1	Universitas Muslim Indonesia Makassar	Panitera
16	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	S2	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
17	Haris, S.H.I., M.Sy.	S2	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	Panitera Pengganti
18	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	S2	Universitas Bosowa	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
19	Dra. Hj. Rosmini	S1	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG	Panitera Pengganti
20	Bintang, S.H.	S1	Universitas 45 Makassar	Panitera Muda
21	Siti Jamila, S.H.	S1	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	Panitera Pengganti

22	Andi Suardi, S. Ag.	S1	STAIN Watampone	Panitera Muda
23	Hj. Fitriani, S.Ag.	S1	Universitas Muslim Indonesia Makasar	Panitera Pengganti
24	Hj. Asmah, S.H.	S1	STIH PENGAYOMAN WATAMPONE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana
25	Hayad Jusa, S.Ag.	S1	Universitas Muslim Indonesia Makasar	Panitera Muda
26	Dra. Hj. Samsang	S1	Institut Agama Islam Negeri Watampone	Panitera Pengganti
27	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	S1	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
28	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	S2	UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ALAUDDIN	Panitera Pengganti
29	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	S1	STAI DDI AD Mangkoso	Penyusun Laporan Keuangan
30	Muhammad Syahrani, S.H.	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	Juru Sita
31	Maryati M, S.H.	S1	Universitas Hasanuddin Makassar	Panitera Pengganti
32	Asril Amrah, S.H.I.	S1	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DDI MANGKOSO	Panitera Pengganti
33	Ridmajayanti, S.Sos.	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimanggalat ung Bone, Watampone	Juru Sita
34	Agustiawati, S.E., S.H.	SI	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	Panitera Pengganti
35	Panggih Tridarma, S.Kom.	S1	UNIVERSITAS DIPONEGORO	Pranata Komputer Ahli Pertama

36	Breend Benny Dharmawan, S.E.	S1	UNIVERSITAS DIPONEGORO	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
37	Fathur Razak, S.Sy.	S1	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Watampone	Analisis Perkara Peradilan
38	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	S1	Universitas Darussalam Gontor	Analisis Perkara Peradilan
39	Nanni, S.AN.	S1	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Veteran Palopo, Palopo	Analisis Tata Laksana
40	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	D-III	Universitas Jenderal Soedirman	Pengelola Barang Milik Negara
41	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Arsiparis Pelaksana
42	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	D-III	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	Pengelola Perkara
43	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak	D-III	Universitas Diponegoro	Pengelola Barang Milik Negara
44	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B	D-III	Politeknik Negeri Semarang	Pengelola perkara



Gambar 3.2

Diagram Komposisi SDM Berdasarkan Komposisi Terakhir

Dalam periode tahun 2023, sesuai perkembangan struktur organisasi Peradilan Agama, keadaan SDM teknis yudisial dan non teknis yudisial di Pengadilan Agama Watampone adalah terdapat 13 orang Hakim, 17 orang Kepaniteraan dan 2 orang Juru Sita, serta Kesekretariatan sebanyak 12 orang. Adapun perkembangan SDM pada Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3.3

Diagram Jumlah Tenaga Teknis Yudisial dengan Non Yudisial



Gambar 3.4

Diagram Klasifikasi Tenaga Teknik Yudisial

1. Mutasi

Mutasi merupakan suatu perubahan posisi, jabatan, tempat maupun pekerjaan yang dilakukan, baik secara horisontal maupun vertikal dalam suatu organisasi.

Upaya ini dilakukan Mahkamah Agung terhadap SDM, khususnya pada Pengadilan Agama Watampone yang menjadi bagian dari fungsi pengembangan SDM karena tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. Selain itu, mutasi ini juga menjadi stimulus bagi SDM untuk meningkatkan kinerjanya, dan bagi Pengadilan Agama Watampone berguna untuk menciptakan keseimbangan antara SDM dengan komposisi pekerjaan/jabatan.

Perkembangan mutasi tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3

Daftar Mutasi Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, S.H., M.H.	Hakim PA Sengkang	Hakim PA Watampone
2	Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H	Hakim PA Watampone	Hakim PA Sengkang
3	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	Panitera PA Surabaya	Hakim PA Watampone
6	Hakim Wahyu Ramadhana, S.A.P	Analisis Kepegawaian PA Watampone	Kepaniteraan Mahkamah Agung
7	Muhammad Suardi, S.H.	Juru Sita PA Watampone	Panitera Pengganti PA Sinjai
8	Asril Amrah, S.H.I.	Panitera Pengganti PA Kendari	Panitera Pengganti PA Watampone
9	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	Kasubag. PA Makassar	Kasubag. PA Watampone
10	Agustiawati, SE.S.H.	Panitera Pengganti PA Watampone	Panitera Pengganti PA Watampone
11	Nanni, S.A.N.	Pengadministrasi Pemda Palopo	Analisis Tata Laksana PA Watampone
12	ANDI MUHAMMAD AMIN, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan PA

		PA Jeneponto	Watampone
13	Nurul Indaryana Wahid, A.Md.A.B	Pengelola Perkara PA Watampone	Pengelola Perkara PA Makassar

2. Promosi

Promosi merupakan suatu perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang memiliki status yang lebih tinggi. Landasan para pengambil kebijakan memberi promosi kepada pegawai tertentu adalah kepercayaan terhadap kejujuran, kemampuan/kompetensi dan kecakapan pegawai tersebut. Tujuan Mahkamah Agung memberikan promosi pada SDM Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar sehingga dapat menimbulkan kepuasan, kebanggaan pribadi dan status sosial yang semakin tinggi. Selain itu untuk memotivasi pegawai yang menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi tersebut.

Tabel 3.4

Daftar Promosi Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan lama	Jabatan baru
1	Muhammad Suardi, S.H	Juru Sita PA Watampone	Panitera Pengangti PA Sinjai

3. Pensiun atau Meninggal Dunia

Pensiun adalah batas usia seseorang bekerja secara produktif. Pada tahun 2023, terdapat pegawai maupun hakim Pengadilan Agama Watampone yang memasuki usia pensiun atau meninggal.

Tabel 3.5

Daftar Pensiun Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Watampone

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Drs. H.Muh. Yusuf Hs, S.	Hakim PA Watampone	Pensiun
2	Hj. Kartini, S.H.	Panitera Pengganti Watampone	Pensiun

3	Drs. Abd. Rahman	Hakim PA Watampone	Pensiun
4	Drs. H. Kamaluddin, S.H	Hakim PA Watampone	Pensiun
5	Heriawati, S.H.	Juru Sita PA Watampone	Meninggal

4. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Pada pasal 70 disebutkan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Diklat merupakan upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi. Tujuan dilaksanakannya program diklat pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik.

Tabel 3.6

Daftar Pegawai / Hakim yang telah Mengikuti Diklat pada Tahun 2023

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Lama Diklat
1	Dra. Hj.Heriyah, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	27 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan	

		Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
2	HADRAWATI, S.Ag., M.H.I..	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik Training of Trainer : Bimbingan Teknis Kompetensi Hukum Acara Peradilan Agama Training of Trainer : Bimbingan Teknis Kompetensi Hukum Acara Peradilan Agama Training of Trainer : Bimbingan Teknis Kompetensi Hukum Acara Peradilan Agama Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	10 Maret 2023 17 Juli 2023 28 Juli 2023 25 Agustus 2023 22 September 2023 12 Oktober 2023 27 Oktober 2023
3	MUNIROH NAHDI, S.H., M.H.	PENINGKATAN PROFESIONALISME BAGI JURUSITA/JSP Diklat Teknis Manajemen ASN	01 Juli 2023 15 November 2023
4	Drs. H. ABD. JABBAR, M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023

		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	27 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
5	Dra. SITI JOHAR, M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
6	Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis	27 Oktober 2023

		Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
7	Dra. Hj. SITI HUSNAENAH, M.H.	Training of Trainer : Bimbingan Teknis Kompetensi Hukum Acara Peradilan Agama	28 Juli 2023.
		Training of Trainer : Bimbingan Teknis Kompetensi Hukum Acara Peradilan Agama	25 Agustus 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	27 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
8	Dra. Hj. WARNI, M.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam	12 Oktober 2023

		Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	24 November 2023
9	Dra. Hj. SITI AMIRAH	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	24 November 2023
10	HAYAD JUSA, S.Ag.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf"	22 September 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	12 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023
11	BINTANG, S.H.	Kaidah Hukum dalam Putusan Yang Berkeadilan	27 Oktober 2023
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi	12 Oktober 2023

12	ANDI SUARDI, S. Ag.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	12 Oktober 2023 27 Oktober 2023 24 November 2023
13	NURHIDAYAH, S.Ag., M.H.	E-Learning Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi Pelaksana Angkatan II Pelatihan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen Seminar /Konferensi/Sarasehan Open Class (AP Corner) Kebijakan Revisi Anggaran dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tahun 2023	01 Maret 2023 09 Maret 2023 30 Agustus 2023
14	HARIS, S.H.I., M.Sy.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	24 November 2023.
15	SITI JAMILA, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	31 Juli 2023
16	MARYATI M, S.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi	22 September 2023 12 Oktober

		Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	2023
17	ASRIL AMRAH, S.H.I.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Implementasi Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Mengadili Perkara Disepensasi Perkawinan"	27 Oktober 2023 22 September 2023 12 Oktober 2023
18	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Open Class (AP Corner) Tips dan Trik Menghasilkan Laporan Keuangan 2022 yang Andal : Perspektif Kebijakan, Aplikasi, dan Pengendalian Internal Tahun 2023 Workshop IKPA Seri III 2023 : Kinerja dan Probis Proyeksi Target Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN 2023 Open Class (AP Corner) Highlight APBN Tahun 2023 Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan E-Learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Angkatan V Tahun 2023	18 Januari 2023 17 Juli 2023 18 Juli 2023 15 Agustus 2023
19	PANGGIH TRIDARMA, S.Kom.	Webinar Empowering Governments to Improve Outcomes and Public Trust With Data-Driven Decisions	03 November 2023

20	ROFIKA KHOIROTUN NISA, A.Md.	Aplikasi SAKTI dan E- Pelatihan Teknis E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Diklat Teknis Manajemen ASN	01 November 2023 15 November 2023
----	---------------------------------	--	--

Peningkatan kualitas SDM secara umum merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, karena diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, khususnya untuk PNS atau aparatur agar dicapainya kompetensi tertentu.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : SP DIPA-005.01.2.307509/2023 tanggal 30 Nopember 2023 sejumlah Rp 13.291.341.000,- (*tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*). Namun setelah revisi pengurangan Belanja Pegawai dan Belanja Sewa, anggaran menjadi Rp 10.373.445.000,- (*sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 30 Nopember 2022 sejumlah Rp.183.357.000,- (*seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Selama tahun anggaran 2023 telah dilakukan revisi DIPA 307509 sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 13 Februari 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 04 April 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 26 Mei 2023 tentang tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (pengurangan anggaran belanja sewa).
- 4) Revisi IV tanggal 14 Juli 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 5) Revisi V tanggal 06 Oktober 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 6) Revisi VI tanggal 03 November 2023 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (pengurangan anggaran belanja pegawai).
- 7) Revisi VII tanggal 17 November 2023 tentang pemutakhiran POK.

- 8) Revisi VIII tanggal 04 Desember 2023 tentang perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (penambahan anggaran belanja pegawai).
- 9) Revisi IX tanggal 08 Desember 2023 tentang pemutakhiran POK.
- 10) Revisi X tanggal 27 Desember 2023 tentang pemutakhiran POK.

Selama tahun anggaran 2023 telah dilakukan revisi DIPA 309076 sebanyak 5 (empat) kali yaitu :

- 1) Revisi I tanggal 13 Februari 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 2) Revisi II tanggal 04 April 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 3) Revisi III tanggal 10 Juli 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 4) Revisi IV tanggal 09 Oktober 2023 tentang perubahan halaman III DIPA.
- 5) Revisi V tanggal 17 November 2023 tentang pemutakhiran POK.

Program - program pada Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 :

1. Program Dukungan Manajemen:

a. Belanja Barang Non Operasional

1. Pagu Rp.13.209.000,-
2. Realisasi Rp.13.209.000,-(100%)
3. Sisa Rp.0,-(0 %)

b. Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)

- 1) Pagu Rp.8.729.516.000,- (Setelah revisi)
- 2) Realisasi Rp.8,183,847,190,- (93,75%)
- 3) Sisa Rp.545.668.000,- (6,25 %)

b. Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

- Pagu Rp.1,630,720,000,- (Setelah revisi)
- Realisasi Rp.1,630,700,810,- (100 %)
- Sisa Rp.19.190,- (0 %)

c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- Pagu Rp.118.000.000,-
- Realisasi Rp.117.992.500,- (99,99 %)
- Sisa Rp. 8.000,- (0,01 %)

Komponen yang terdapat pada program ini terdiri dari :

1. Komponen 051 (Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah) :

Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel

2. Komponen 001(Gaji dan Tunjangan)

3. Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor):

A. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran:

1) Belanja Keperluan Perkantoran

- Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor
- Biaya Penjilidan/Setak/Cek
- Jasa Satpam, Supir dan Pramubakti
- Langganan Surat Kabar
- Air Minum/Galon

2) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran

B. Langganan Daya dan Jasa:

1) Belanja Keperluan Perkantoran

- Langganan Internet

2) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3) Langganan Telepon

4) Langganan Air (PDAM)

5) Belanja Sewa (Sewa Web Hosting)

C. Pemeliharaan Kantor:

1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan Rumah Dinas

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan P.C.
- Pemeliharaan Laptop/Notebook
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
- Pemeliharaan Genset
- Pemeliharaan A.C. Split
- Pemeliharaan CCTV

D. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional:

- 1) Belanja Keperluan Perkantoran : Pakaian Dinas CPNS, Pakaian Dinas Pegawai non Hakim, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti.
- 2) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja : Honor Pengelola PNB, Honor Bendahara Pengeluaran, Honor PPSPM, Honor KPA, Honor Staf Pengelola Keuangan.

E. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan :

- 1) Bahan/Spanduk/Dokumentasi

F. Rapat Koordinasi Internal

- 1) Kudapan/Snack

G. Konsultasi ke Tingkat Banding

- 1) Perjalanan Dinas Biasa

H. Konsultasi ke KANWIL / KPKNL

- 1) Perjalanan Dinas Biasa

I. Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim :

- 1) Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

Pelaksanaan anggaran tahun 2023 DIPA 307509 secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena adanya sisa anggaran Belanja Pegawai, dan akun tersebut tidak bisa digeser ke akun lain sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar 93,75%.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Belanja Barang DIPA BADILAG / 309076)

Program penegakan dan pelayanan hukum ini hasilnya adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama Watampone.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pemberian bantuan pembebasan biaya perkara,operasional Pos BantuanHukum, pelaksanaan sidang diluar gedung dan sidang pelayanan terpadu.

Tabel 4.1
Rincian Anggaran DIPA 309076 Tahun 2023

No	Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	Pos Bantuan Hukum	Rp70.000.000,-	Rp69.900.000,-	Rp100.000,-
2	Pembebasan Biaya Perkara	Rp19.250.000,-	Rp19.247.000,-	3.000,-
3	Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp43.707.000,-	Rp43.707.000,-	0,-
4	Layanan Sidang Terpadu	Rp50.400.000,-	Rp50.400.000,-	0,-
	Total	Rp183.357.000,-	Rp 183.254.000,-	Rp103.000,-



Gambar 4.1
Diagram Realisasi Anggaran DIPA Satker 309076

Adapun Belanja Barang dari DIPA 309076 berhasil mencapai realisasi sebesar 99,94%, dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo melebihi target (35 perkara), yaitu 89 perkara. Kegiatan Sidang Diluar Gedung sebanyak 17 kegiatan dan Sidang Pelayanan Terpadu yang ditargetkan sebanyak 8 kegiatan berhasil terlaksana semua, serta Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Dinas

Ada dua jenis kendaraan dinas Pengadilan Agama Watampone, yakni kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Total nilai aset kendaraan dinas jika dinilai dengan hitungan rupiah pada tahun 2023 adalah Rp455.024.828 (*empat ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*).

Tabel 4.2
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Kijang Innova	2007		√		
2.	Kijang Avanza	2011		√		
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Suzuki Shogun Racing FD 125 XRM	2006		√		
2.	Suzuki Tunder EN 125	2006			√	
3.	Yamaha Jupiter MX 286	2007	√			
4.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
5.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
6.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
7.	Suzuki Shogun FL 125 SD	2008	√			
8.	Suzuki Shogun R FL 125 SD	2009	√			

2. Rumah Dinas

Rumah dinas Pengadilan Agama Watampone yang berdiri di atas tanah seluas 1.308 M² merupakan gedung / kantor lama yang telah dilalih fungsikan menjadi rumah dinas.

Tabel 4.3
Rumah Dinas Pengadilan Agama Watampone

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
3.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			

Tanah Bangunan Rumdis seluas 1.308 M² Rp. 1.406.704.000

Rumah Dinas	449 M2	Rp. 720.981.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp. 2.127.685.000

Total nilai aset rumah dinas (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.127.685.000,-** (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

3. Bangunan Gedung Kantor

Gedung Pengadilan Agama Watampone yang sekarang ini, diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2008 oleh DR. H.A. Harifin Tumpa, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI saat itu. Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.424 M² dan telah resmi ditempati sejak peresmian.

Tabel 4.4
Matrik Bangunan Gedung Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana	Jumlah	Ket.
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	4	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Utama	1	
7	Ruang Sidang Umum	2	
8	Ruang Kepaniteraan	1	
9	Ruang ATK Perkara	1	
10	Ruang Kesekretariatan	1	
11	Ruang Bendahara	1	
12	Ruang Arsip Kesekretariatan	1	
13	Ruang Pusat PTSP	1	
14	Ruang Panitera Pengganti	1	
15	Ruang Mediasi	1	
16	Ruang Media Center	1	
17	Ruang Perpustakaan	1	
18	Ruang Juru Sita	1	
19	Ruang Arsip Perkara	1	
20	Ruang Laktasi	1	
21	Toilet Umum	4	

22	Ruang Tunggu Persidangan	1	
23	Ruang Posbakum	1	
24	Ruang TI	1	
25	Pos Keamanan	2	
26	Mushollah	1	
27	Tempat Parkiran	2	
	Jumlah	36	

Tanah Bangunan Kantor seluas	3.424 M2	Rp.	3.832.124.000
Gedung dan Bangunan Kantor	1.823 M2	Rp.	6.095.150.000
Nilai aset (dalam rupiah)		Rp.	9.927.274.000

Total nilai aset Bangunan Gedung Kantor (beserta tanahnya) Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 9.927.274.000,-** (*sembilan milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

4. Sarana / Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Total nilai aset sarana / prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watampone jika dinilai dengan hitungan rupiah adalah **Rp 2.711.214.068,-** (*dua milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah*).

Rincian jumlah sarana dan prasarana Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran
Pengadilan Agama Watampone

No	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	B	RR	RB	Keterangan
1	Lemari Besi/Metal	69	69	-	-	
2	Lemari kayu	6	5	1	-	
3	Rak Besi	1	1	-	-	
4	Rak kayu	2	-	2	-	
5	Filling Kabinet Besi	1	1	-	-	

6	Brandkas	2	2	-	-
7	Tabung Pemadam	5	5	-	-
8	CCTV	1	1	-	-
9	Papan Visual	4	3	1	-
10	Mesin Antrian	1	1	-	-
11	Mesin Absensi	1	1	-	-
12	Perkakas Kantor Lainnya	1	1	-	-
13	Meja kerja kayu	71	71	-	-
14	Kursi Besi/Metal	168	167	-	1
15	Kursi Kayu	12	-	12	-
16	Sice	5	4	1	-
17	Meja Rapat	2	2	-	-
18	Meja Telpn	1	1	-	-
19	Meja Resepsionis	2	2	-	-
20	Sketsel	2	2	-	-
21	Kursi Tunggu	7	7	-	-
22	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	-
23	Lemari Es	6	6	-	-
24	A.C. Split	19	15	4	-
25	Kipas Angin	1	1	-	-
26	Kompor Gas	1	-	1	-
27	Tabung Gas	1	1	-	-
28	Televisi	6	6	-	-
29	Loudspeaker	4	4	-	-
30	Microfon	7	7	-	-
31	Standing Bracket TV	1	1	-	-
32	Taplak Meja	1	1	-	-
33	Audio Mixing	1	1	-	-
34	LCD Monitor	1	1	-	-
35	Camera Conference Webcam	1	1	-	-
36	Lambang Garuda Pancasila	2	-	2	-
37	Gambar Presiden/Wapres	2	-	2	-
38	Tiang Bendera	6	6	-	-
39	Tangga Aluminium	1	1	-	-
40	Kaca Hias	6	6	-	-
41	Mimbar/Podium	1	1	-	-
42	Palu Sidang	2	-	2	-
43	Lambang Instansi	1	1	-	-
44	Gordyn/Kray	1	1	-	-
45	Asbak Tinggi	4	4	-	-
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	7	-	-
47	Telephon (PABX)	1	1	-	-

48	Pesawat Telepon	1	1	-	-	
49	Genset	1	1	-	-	
50	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	-	-	
51	P.C. Unit	33	33	-	-	
52	Laptop	33	33	-	-	
53	Printer	9	8	1	-	
54	Scanner	3	3	-	-	
55	Server	2	2	-	-	
56	Router	3	3	-	-	
57	Rak Server	2	2	-	-	
58	Kabel UTP	3	3	-	-	
59	Wireless Access Point	2	2	-	-	
60	Switch	6	6	-	-	
61	Monografi	444	235	209	-	
62	Majalah	6	6	-	-	
63	Laporan	3	3	-	-	
64	Bahan Kartografi Lainnya	8	8	-	-	
	Jumlah	1.009	770	238	1	

Sarana / prasarana fasilitas kantor secara keseluruhan berjumlah 1.009 unit, dengan rincian 770 unit dalam kondisi baik, dan 238 unit rusak ringan dan 1 rusak berat.

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Watampone mendapat alokasi anggaran pengadaan untuk peralatan dan mesin – Ekstrakomptabel berupa :

Inventaris Perkantoran CPNS

- Meja Kerja sebanyak 7 buah
- Kursi Besi/Metal sebanyak 7 buah

b. Pemeliharaan

Pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone mendapat anggaran untuk belanja biaya pemeliharaan, berupa :

- 1) Peralatan dan mesin yang meliputi : pemeliharaan kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, komputer/PC, AC, CCTV, scanner, genset, laptop/notebook, dan printer.

- 2) Pemeliharaan gedung dan bangunan, meliputi : pemeliharaan gedung kantor dan halaman.
- 3) Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya meliputi : pemeliharaan rumah dinas.

Total aset barang milik negara tahun anggaran 2023 dalam hitungan rupiah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Total Aset Negara di Pengadilan Agama Watampone dalam Rupiah

No	Nama Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	5.238.828.000,-
2	Peralatan Dan Mesin	2.809.749.068,-
3	Gedung dan Bangunan	7.799.644.100,-
4	Aset Tetap Lainnya	15.354.679,-
5	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.339.798.086,-)
6	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.071.468.093,-)
7	Barang Konsumsi	788.800,-
Jumlah		12,453,098,468,-

Dari tabel di atas, terlihat bahwa total aset negara di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2023 setelah penyusutan adalah **Rp12,453,098,468,-** (*dua belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi e-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, maka setiap pengadilan wajib menggunakan e-Court dalam penerimaan perkara. Aplikasi

e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Watampone, dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online.

Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual, dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pada e-Litigasi ini, acara persidangan secara elektronik oleh para pihak, dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim, yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Tabel 4.7
Matrik Keadaan Perkara e-Court pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

No	Kategori Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan	9	391	374	17
2	Permohonan	-	80	80	-
	Total	9	471	155	17

Sisa perkara e-Court tahun 2022 sebanyak 9 perkara, dan semuanya sudah diputus. Pada tahun 2023, sebanyak 471 perkara e-Court yang masuk / diterima, tetapi hanya 20 perkara melalui e-Litigasi.

Tabel 4.8
Tahapan Perkara Melalui e-Litigasi Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Tahapan Terakhir
1	74/Pdt.G/2023/PA.Wtp	10 – 01 – 2023	Putus : 06-04-2023
2	263/Pdt.G/2023/PA.Wtp	20 – 02 – 2023	Putus : 24-07-2023
3	308/Pdt.G/2023/PA.Wtp	02 – 03 – 2023	Putus : 27-07-2023
4	302/Pdt.G/2023/PA.Wtp	01 – 03 – 2023	Putus : 09-05-2023
5	373/Pdt.G/2023/PA.Wtp	17 – 03 – 2023	Putus : 31-05-2023
6	396/Pdt.G/2023/PA.Wtp	27 – 03 – 2023	Putus : 26-05-2023
7	718/Pdt.G/2023/PA.Wtp	06 – 07 – 2023	Putus : 07-09-2023
8	657/Pdt.G/2023/PA.Wtp	13 – 06 – 2023	Putus : 11-10-2023
9	662/Pdt.G/2023/PA.Wtp	15 – 06 – 2023	Putus : 18-10-2023
10	779/Pdt.G/2023/PA.Wtp	21 – 07 – 2023	Putus : 28-11-2023
11	829/Pdt.G/2023/PA.Wtp	08 – 08 – 2023	Putus : 02-10-2023
12	888/Pdt.G/2023/PA.Wtp	23 – 08 – 2023	Putus : 25-10-2023
13	982/Pdt.G/2023/PA.Wtp	15– 09 – 2023	Putus : 29-12-2023 Proses Banding 8 -01-2024
14	1151/Pdt.G/2023/PA.Wtp	26 – 10 – 2023	Proses Persidangan
15	1075/Pdt.G/2023/PA.Wtp	10 – 10 – 2023	Proses Persidangan
16	1045/Pdt.G/2023/PA.Wtp	03 – 10 – 2023	Proses Persidangan
17	1208/Pdt.G/2023/PA.Wtp	14 – 11 – 2023	Proses Persidangan
18	1264/Pdt.G/2023/PA.Wtp	28 – 11 – 2023	Proses Persidangan
19	1097/Pdt.G/2023/PA.Wtp	16 – 10 – 2023	Proses Persidangan
20	688/Pdt.G/2023/PA.Wtp	26 – 06 – 2023	Putus : 04-10-2023

2. Implementasi SIPP(Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Aplikasi SIPP merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara, baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan. SIPP memungkinkan akses terhadap berkas arsip perkara. Masyarakat dapat secara langsung mengakses dan mencari subjek perkara.

Kemudahan penyediaan informasi perkara tidak terlepas dari peran aplikasi SIPP yang telah terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Watampone, sehingga informasi perkara yang sangat dibutuhkan seperti progres suatu perkara, jadwal sidang, dan informasi status perkara dapat diperoleh dengan mudah.

Aplikasi SIPP telah dimanfaatkan secara optimal oleh Pengadilan Agama Watampone, mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan PMH (Penunjukan Majelis Hakim), Penetapan Hari Sidang, relaas panggilan, keuangan perkara, pembuatan jadwal sidang, Berita Acara Sidang, hingga produk pengadilan (Putusan/Penetapan dan Akta Cerai).

Selain mengoptimalkan peran website yang terintegrasi dengan SIPP, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan SIPP adalah :

a. SMS Gateway

Pihak berperkara dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara praktis dengan mengirimkan SMS ke nomor yang telah disediakan dan akan mendapatkan balasan secara otomatis.

b. SIPANGGI (Sistem Informasi Panggilan Ghaib)

Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dapat mengetahui informasi jadwal sidang.

c. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya.

d. SIPENGAMPU(Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)

Sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online

kepada Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

e. Aplikasi Notifikasi Perkara (ATIKA)

Sarana pemberitahuan notifikasi seputar perkara untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Pihak dengan mengirimkan pesan melalui whatsapp ke nomor yang terdaftar.

f. Aplikasi Layanan Informasi Virtual (ALIV)

Layanan whatsapp bot yang diperuntukan untuk masyarakat atau pihak berperkara agar dapat memperoleh informasi atau bertanya seputar informasi perkara. ALIV akan membalas secara otomatis jika pesan sesuai dengan format yang ditentukan.



Gambar 4.2
Tampilan Aplikasi SIPP Web Pengadilan Agama Watampone

Aplikasi SIPP yang terpasang di Pengadilan Agama Watampone sekarang adalah versi 5.1.0. Dengan diterapkannya aplikasi SIPP, maka publikasi perkara diharapkan dapat dilaksanakan secara *one day publish* yaitu perkara yang diproses pada hari itu dapat langsung dipublikasikan pada hari tersebut, serta minutasikan berkas perkara dalam satu hari (*one day minutation*).

Adapun beberapa strategi yang ditempuh dalam implementasi program *one day minutation* dan *one day publish* adalah sebagai berikut :

a. Penyeragaman Format

Penyeragaman format yang digunakan dari awal sampai akhir proses persidangan mutlak diperlukan, meliputi penyeragaman gaya selingkung format surat Gugatan atau Permohonan (penulisan identitas, posita dan petitum), penyeragaman template BAS dan Putusan / Penetapan.

b. Peran Aktif Petugas Meja I dan Meja II

Petugas Meja I adalah pintu masuk seseorang beracara di Pengadilan. Dimana ia bertugas untuk menerima gugatan atau permohonan seseorang. Untuk efisiensi dan efektifitas proses selanjutnya, Petugas Meja I harus melakukan pemeriksaan terhadap data yang terdapat dalam surat gugatan atau permohonan yang diajukan.

Petugas Meja II merupakan pintu masuk data gugatan dan permohonan ke dalam aplikasi SIPP. Data yang *diinput* pertama kali, akan menentukan proses selanjutnya.

c. Adanya Koordinasi yang Baik antar Pihak Terkait dengan Perkara

Misalnya adanya koordinasi antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

d. Mempersiapkan Segala Sesuatunya dari Awal Sebelum Perkara Diputus

Untuk mengejar target *one day minutation* dan *one day publish*, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan sebelum persidangan dilakukan. Hal-hal seperti penyusunan jadwal sidang, penyusunan dan pengecekan berkas, pengecekan relaas panggilan, cetak instrumen panggilan atau instrumen pemberitahuan, pencetakan BAS sebelumnya, dan hal lainnya yang dibutuhkan, harus telah dipersiapkan sebelum sidang. Begitu juga dengan kegiatan yang pasti dilakukan setelah persidangan.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021, yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai Lembaga yang banyak berhubungan dengan pelayanan Publik/masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus meningkatkan pelayanan. Pencari keadilan/pengguna jasa pengadilan yang datang saat ini, berbeda dengan mereka yang datang pada beberapa dasawarsa lalu. Kini mereka yang datang semakin terdidik dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu pelayanan profesional sudah merupakan keharusan yang mesti diwujudkan, dan tidak realistis jika suatu pengadilan tanpa memberikan

pelayanan yang terbaik, dan tanpa berusaha meminimalkan ketidakpuasan publik pencari keadilan.

Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dengan mulai Pencanangan Zona Integritas pada bulan Maret 2019 dan telah mengajukan pengusulan setiap tahunnya s.d tahun 2023 namun belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Proses yang dilalui oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dimulai dari mempersiapkan dengan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan menyiapkan berbagai dokumen dianjurkan penilaian oleh Tim penilaian mandiri dari Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Dengan melihat Rencana Pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan, ada beberapa program pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

1. Pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas area proses mulai dari area 1 yakni Manajemen Perubahan hingga area 6 yakni peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Memasifkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas sehingga seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Watampone dapat secara konkrit bertindak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Selain Pembangunan Zona Integritas, PTSP merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung, dan juga merupakan bagian dari penilaian Pembangunan Zona Integritas. Program ini mulai dikenalkan sejak tahun 2017 di beberapa pengadilan pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir di seluruh pengadilan Indonesia.

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara integritas dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan / pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

Program PTSP terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai peradilan Indonesia. Hal tersebut selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (*frontliner*) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal-hal yang bersifat koruptif.

Pada PTSP Pengadilan Agama Watampone telah ditempatkan petugas layanan di loket-loket, di mana para pihak pencari keadilan dapat meminta layanan dan informasi (Petugas PTSP tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/109.OT.01.3/SK/IX/2022). Bahkan juga telah ditempatkan petugas Bank BRI sebagai wujud layanan kepada masyarakat guna menerima panjar biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot dan jauh untuk menyetor biaya panjar perkara ke bank.

Proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegritas. Pelayanan

administrasi terintegritas yang mudah, pasti, dan transparan dapat terwujud melalui PTSP.

Tujuan dari PTSP pada Pengadilan Agama :

- Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan
- Menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan

1. Layanan Pokok PTSP

a. Layanan Informasi / Pengaduan

1) Layanan Informasi

Petugas Informasi dibawah Penanggung jawab Panitera Muda Hukum, memberikan layanan informasi, baik secara prosedur biasa dan prosedur khusus, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta melayani permohonan informasi, baik yang diajukan secara lisan atau tulisan.

2) Layanan Pengaduan

Petugas pengaduan melayani pengaduan, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis.

a) Pengaduan secara Lisan :

- Menghadap langsung petugas Meja Pengaduan kantor Pengadilan Agama Watampone pada jam kerja, mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WITA.
- Menyampaikan secara lisan permasalahan / pengalaman yang dialami sebenarnya (tidak fiktif).

b) Pengaduan secara tertulis :

- Menyampaikan / mengirim surat resmi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan cara :
 - Diantar langsung
 - Melalui Pos
 - Melalui Faximile (0481) 21018
 - Melalui E-mail: pawatampone1a@gmail.com

- Melalui aplikasi SIWAS MA RI
- Menyertakan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan secara tertulis.

b. Layanan Pendaftaran Perkara

Layanan Pendaftaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pendaftaran Perkara meliputi :

- 1) Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan tingkat pertama;
- 2) Penerimaan pengajuan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali;
- 3) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Konsinyasi;
- 4) Penerimaan Pendaftaran Permohonan Eksekusi;
- 5) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

c. Layanan Pembayaran Perkara

Layanan Pembayaran Perkara dilakukan oleh Petugas Pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir, dibawah Penanggung Jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Layanan Pembayaran Perkara meliputi :

- 1) Penaksiran Panjar Biaya Perkara;
- 2) Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
- 3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 4) Pengembalian Sisa Panjar (PSP) Biaya Perkara;
- 5) Penyerahan bukti-bukti Pembayaran;
- 6) Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan

Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan, yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan meliputi :

- 1) Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan;
- 2) Penyerahan Akta Cerai;
- 3) Dokumen-dokumen resmi Pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Layanan Penunjang PTSP

a. Layanan Posbakum

Layanan Posbakum meliputi Konsultasi Hukum dan bantuan pembuatan Surat Gugatan atau Permohonan bagi Pencari Keadilan.

b. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

Untuk sistem pembayaran biaya perkara, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal, yaitu PT BRI Cabang Watampone dengan System Payment Point yang ada lingkungan PTSP itu sendiri.

c. Layanan Materai dan Legalisir atau Nazzeglen

Untuk sistem layanan materai dan legalisir atau nazzeglen, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan MoU dengan Penyedia Jasa Eksternal yaitu PT POS Cabang Watampone.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan / masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama Watampone. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan / masyarakat.

Saat ini inovasi dan pemanfaatan teknologi menjadi keharusan sebagai alat penunjang pelayanan publik. Dukungan teknologi yang semakin berkembang serta masyarakat yang juga semakin modern dalam

menggunakan media elektronik, memacu Pengadilan Agama Watampone melakukan terobosan inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan peningkatan kinerja bagi pegawai Pengadilan Agama Watampone, maka berikut ini beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut :

1. SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

SIPETTUNI merupakan aplikasi berbasis web yang dipergunakan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang sudah mendapatkan akta cerai untuk mengubah status di KTP-nya. Aplikasi ini dibuat untuk meningkatkan kinerja dengan sarana teknologi informasi sehingga memudahkan bagi para *stakeholder* yang terlibat dan mewujudkan pelayanan *one-day-service*. Aplikasi ini dibuat dari hasil kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.



Gambar 5.1
Tampilan Halaman Awal Aplikasi SIPETTUNI

Aplikasi ini terdiri dari halaman untuk pihak pencari keadilan, dan halaman untuk admin Dukcapil.



Form Permohonan Ubah Status Perkawinan

Permohonan Khusus Pihak di Wilayah Pengadilan Agama Watangene

Nama Pemohon

Nama Akta Cerai

[Kirim](#)

[Kembali ke Halaman Utama](#)

Gambar 5.2
Tampilan Halaman untuk Pengguna




SIPETTUNI (Sistem Informasi Pengubah Status Perkawinan)

Sistem Aplikasi yang Dibuat dan Berbasis Kajian Agama
Pengadilan Agama Watangene dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

Copyright © 2023



Selamat Datang
Admin

[Logout](#)

[Menu](#)

Gambar 5.3
Tampilan Halaman untuk Admin

2. SIPENGAMPU (Sistem Informasi Pengiriman Amar Putusan Pengadilan)

SIPENGAMPU merupakan sarana pengiriman Amar dan Salinan Putusan dalam bentuk digital yang diciptakan untuk mengirim Amar dan Salinan Putusan secara online kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dan Dinas DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil) sesuai dengan hasil kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan bagi KUA dan Dinas DUKCAPIL sebagai bahan validasi akta cerai dan putusan dari data perkara yang ada di Pengadilan Agama Watampone agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen seperti pemalsuan data dan lain sebagainya.



Gambar 5.4
Tampilan Halaman Login Aplikasi SIPENGAMPU

Aplikasi ini terdiri dari data jumlah perkara di Pengadilan Agama yang telah putus, baik cerai gugat, cerai talak, pengesahan nikah, dispensasi kawin maupun jenis perkara lainnya yang dapat dilihat atau diunduh oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL.



Gambar 5.5
Tampilan Halaman Dashboard SIPENGAMPU

Proses ini dimulai dengan pengambilan data dari Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Watampone yang diintegrasikan ke aplikasi SIPENGAMPU, dan selanjutnya dapat diakses oleh pihak KUA dan Dinas DUKCAPIL, sesuai dengan hak akses yang telah diberikan menurut user masing-masing.

SIPENGAMPU merupakan upaya terobosan perubahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengiriman Amar dan Salinan Putusan kepada KUA dan Dinas DUKCAPIL dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik, khususnya pada satuan kerja Pengadilan Agama Watampone. Karena mengingat ketika pengiriman Salinan Putusan masih dilakukan dengan cara manual, telah terjadi beberapa permasalahan adalah tidak adanya biaya pengiriman khusus, baik dari panjar biaya perkara maupun dari DIPA Pengadilan Agama Watampone, serta penggunaan waktu yang cukup lama, maka dengan terciptanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar sehingga kinerja institusi semakin lebih efektif dan efisien.

3. SI MAPAN

Aplikasi SI MAPAN menyediakan informasi tentang program rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan anggaran secara digital,

berbasis website dan dapat diakses oleh semua orang. Hal tersebut memberi kemudahan bagi Pimpinan / Pembuat Keputusan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, Tim Pengelola DIPA juga mudah dalam mengontrol realisasi pelaksanaan anggaran bulan berjalan.

Walaupun aplikasi SI MAPAN tidak berdampak secara langsung terhadap pelayanan publik di Pengadilan Agama Watampone, tetapi SI MAPAN dapat memberikan dukungan layanan secara optimal terhadap pengelolaan anggaran.

Aplikasi SI MAPAN dapat diakses pada url : simapan.pa-watampone.net. Aplikasi SI MAPAN terdiri dari 2 bagian utama, yaitu Home dan Login.



Gambar 5.6
Tampilan Bagian Home (Sebelum Login)

Bagian Home memungkinkan semua orang dapat mengakses informasi pengelolaan anggaran pada Pengadilan Agama Watampone. Pada bagian ini terdapat 2 tombol pilihan untuk menentukan data satker mana yang akan diakses, apakah 307509 untuk anggaran dari Badan Urusan Administrasi atau 309076 untuk anggaran dari Badan Peradilan Agama. Ketika kita pilih salah satu satker, maka akan muncul 5 menu

utama sesuai target tahapan implementasi, dimana menu perencanaan sebagai default.



Gambar 5.7
Tampilan Menu Perencanaan Satker 307509 (Dashboard)

Pada menu perencanaan, terdapat filter tanggal revisi untuk melihat program rencana kegiatan pelaksanaan anggaran tiap bulan secara detail. Dengan tombol download, kita dapat mendownload data tersebut dalam bentuk file PDF dan mencetaknya.

Untuk bagian utama lainnya, yaitu Login, digunakan oleh user untuk mengupdate data pengelolaan anggaran.



Gambar 5.8
Tampilan Dashboard (Setelah User Login)

4. KURSI PRIORITAS

Pada inovasi yang terdapat di Pengadilan Agama Watampone, khususnya di ruang tunggu telah tersedia kursi prioritas (priority seats) untuk masyarakat pencari keadilan khususnya untuk bagi kelompok rentan, seperti: penyandang disabilitas, ibu hamil, usia lanjut (lansia) dan ibu menyusui.



Gambar 5.9

Kursi Prioritas dan Space untuk Kursi Roda di Ruang Tunggu

Dengan tersedianya kursi prioritas (priority seats) diharapkan dapat membantu dan memberi kemudahan akses bagi kelompok rentan, yaitu dekat dengan meja layanan prioritas dan dekat diruang siding. Dan juga dapat memberi nilai plus bagi Pengadilan Agama Watampone karena telah tersedia fasilitas pendukung bagi kelompok rentan, dan dapat meningkatkan pelayanan bagi kelompok rentan.

5. AREA DROP ZONE DAN PARKIR KHUSUS DISABILITAS

Dalam upaya menerapkan pelayanan yang prima dan dapat memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar dapat menggunakan fasilitas di Pengadilan Agama Watampone dengan baik,

disediakan area drop zone dan parkir khusus disabilitas yang sesuai dengan anjuran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.



Gambar 5.10

Parkir Khusus Disabilitas

Area parkir khusus disabilitas ini berada dekat dengan akses masuk ke Gedung pelayanan di Pengadilan Agama Watampone dan bersebelahan dengan area drop zone agar memudahkan penyandang disabilitas memarkirkan kendaraannya ketika berada di Pengadilan Agama Watampone. Area parkir khusus disabilitas diberi warna biru dan symbol parkir khusus disabilitas agar pengunjung Pengadilan Agama Watampone yang bukan merupakan penyandang disabilitas tidak memarkirkan kendaraannya di area tersebut.

6. LACAK PROSES TAHAPAN PERKARA

Aplikasi Lacak Proses Perkara adalah solusi modern yang memungkinkan pihak berperkara dan masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara hukum mereka secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi real-time tentang status perkara dan jadwal

persidangan, memberikan transparansi yang lebih besar dalam proses hukum. Aplikasi ini membawa efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, memperkuat hubungan antara Pengadilan Agama Watampone dan masyarakat.



Gambar 5.11
Tampilan Halaman Lacak Proses Tahapan Perkara

7. BUKU TAMU DIGITAL

Aplikasi Buku Tamu Digital Pengadilan Agama Watampone adalah solusi modern untuk pencatatan kunjungan yang mengintegrasikan fitur kamera wajah. Aplikasi ini memudahkan pengunjung untuk *check-in* dengan cepat melalui pemindaian wajah, meningkatkan keamanan dan menyediakan data kunjungan yang akurat bagi pengelolaan pengadilan. Fitur ini juga memungkinkan pencatatan waktu kunjungan secara real-time, menjamin efisiensi dan transparansi proses penerimaan tamu.



Gambar 5.12
Tampilan Halaman Buku Tamu Digital

8. SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Sistem Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama Watampone adalah platform digital canggih yang dirancang untuk memodernisasi dan mempermudah pengelolaan administrasi kepegawaian. Sistem ini memiliki dua fitur utama yang sangat bermanfaat:

1. **Fitur Izin Cuti Tahunan:** Fitur ini memungkinkan pegawai untuk mengajukan cuti tahunan dengan mudah melalui portal online. Pegawai dapat memasukkan tanggal cuti, sementara sistem secara otomatis melacak sisa jatah cuti dan memperbarui catatan secara real-time. Manajemen dapat meninjau dan menyetujui permohonan cuti dengan cepat, memastikan proses yang efisien dan transparan.

2. **Fitur Penilaian Kinerja Pegawai:** Fitur ini menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menilai kinerja pegawai. Melalui sistem ini, manajer dapat menetapkan tujuan, memberikan umpan balik, dan melakukan penilaian secara periodik. Pegawai dapat mengakses evaluasi mereka, menerima umpan balik konstruktif, dan memantau perkembangan pribadi mereka. Sistem ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan profesional dan memastikan standar kinerja yang tinggi di seluruh organisasi.

Dengan fitur-fitur ini, Sistem Administrasi Kepegawaian Pengadilan Agama Watampone berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keterlibatan pegawai. Ini merupakan langkah besar menuju digitalisasi proses administratif dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerja yang modern.



Gambar 5.13
Tampilan Login Sistem Administrasi Kepegawaian



The screenshot shows a web application interface for SIPP data statistics. On the left is a dark blue sidebar with navigation links. The main content area has a green header bar. Below the header, there's a table with the following data:

Kategori	Jumlah Data	Rata-rata	Standar Deviasi
1. Tidak Terpapar	100	100	0
2. Terpapar	100	100	0
3. Tidak Terpapar	100	100	0
4. Terpapar	100	100	0
5. Tidak Terpapar	100	100	0
6. Terpapar	100	100	0
7. Tidak Terpapar	100	100	0
8. Terpapar	100	100	0
9. Tidak Terpapar	100	100	0
10. Terpapar	100	100	0

Gambar 5.15
Tampilan Halaman Statistik Data SIPP

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan peradilan, dalam melakukan pengawasan Internal berpedoman kepada :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan,
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan,
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan,
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan keputusan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Watampone selaku pimpinan tertinggi pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai. Karena peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara sangat penting, pengawasan diperlukan untuk membina sikap dan perilaku disiplin, loyalitas, bertanggung jawab, jujur, dan

selalu mengembangkan sumber daya sehingga dapat meningkatkan kinerja yang mengarah pada peningkatan pelayanan masyarakat. Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendukung peningkatan tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus terhadap hakim dan pegawai.

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif,
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HaWasBid) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : 143/KPA.W20-A2/PW1.1/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang meliputi berbagai bidang, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui :
 - a. Eksaminasi Putusan
 - b. LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

Pengawasan yang dilakukan HaWasBid untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HaWasBid yang ditunjuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Koordinator Pengawas, diteruskan ke pimpinan serta Hakim Tinggi Pengawas Daerah setiap bulan.

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor : 143/KPA.W20-A2/PW1.1/IX/2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone :

**HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. NIP. 19691124 199403 2 004 Dra. Hj. Sitti Amirah NIP. 19611002 198803 2 001	Zelvyana M. Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Dra. Hj. Badriyah, S.H. NIP. 19581231 198203 2 021 Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	Ahmad Amiruddin
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. H. Idris, M.HI. NIP. 19581231 198503 1 051	Iriani Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. NIP. 19680511 1994032003 Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	A. Ulfiyah Nur Satriani
5.	Kinerja pelayanan publik	Drs. H. Muh. Tang, M.H. NIP. 19581231 198703 1 030 Dra. Hj. Warni, M.H. NIP. 19650727 199401 2 001	Dyta Nurul Yunus Hermawati

B. Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja digunakan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan penanganan yang terbaik terhadap sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan agar dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi kinerja dapat

dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan oleh stakeholder di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran di kantor dan di saat jam kerja;
- Konsistensi penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasir dan user SIPP lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- Menjaga Kebersihan dan kerapian lingkungan kerja;
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Implementasi aplikasi e-Court dan 11 (sebelas) aplikasi Inovasi Ditjen Badilag;
- Peningkatan kinerja seluruh hakim dan pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
- Peningkatan ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam pembuatan laporan, dan pemberkasan perkara Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali.
- Akreditasi Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2023 adalah 98,16%, dengan perhitungan perkara diterima tahun 2023 sejumlah 1.953 perkara ditambah perkara sisa tahun 2022 sejumlah 54 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2023 sejumlah 2.007 perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 1.970 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2023 sejumlah 37 perkara (1,84 %).
2. Penyerapan anggaran DIPA Satker 307509 tahun 2023 sebesar 93,75 %. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan program Dukungan Manajemen telah dilaksanakan dengan baik;
3. Penyerapan anggaran DIPA Satker 309076 tahun 2023 sebesar 99,94 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Pengkakan Dan Pelayanan Hukum telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan tugas peradilan sesuai ketentuan.

B. Rekomendasi

1. Sangat diperlukan peningkatan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai penunjang agar Pengadilan Agama Watampone dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melayani masyarakat pencari keadilan,
2. Perlu adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi / baik,

3. Perlu adanya penambahan pegawai untuk :
 - a. Hakim,
 - b. Panitera Pengganti,
 - c. Juru Sita.
4. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi hakim dan pegawai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 P.A. Watampone



**SK TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR: 163/KPA.W20-A2/SK.OT.01.1/XII/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PELAKSAAN KEGIATAN TAHUN 2023
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/KMA/SK/I/2023, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perebendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A TAHUN 2023;
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah :
- a. Menginventarisir dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari sub-sub Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
 - b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Watampone Kelas I A Tahun 2023 sesuai outline;
 - c. Laporan dibuat dalam bentuk soft copy dan hard copy yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai jadwal yang ditetapkan.
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 20 Desember 2023



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 163/KPA.W20-A2/SK.OT.01.1/XII/2023
TANGGAL : Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2023

Penanggungjawab: Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. (Ketua)
Koordinator : Hadrawati, S.Ag., M.H.I. (Wakil Ketua)
Ketua : Lukman Patawari, S.H. (Panitera)
Sekretaris : Muniroh Nahdi, S.H., M.H. (Sekretaris)
Anggota : Hayad Jusa, S.Ag. (Panitera Muda Hukum)
Andi Suardi, S.Ag. (Panitera Muda Gugatan)
Bintang, S.H. (Panitera Muda Permohonan)
Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H. (Kasubbag.
Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
Nurhidayah, S.Ag. (Kasubbag. Umum dan Keuangan)
Hj. Asmah, S.H. (Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala)
Breend Benny Dharmawan (Klerek-Penalaah Teknis
Kebijakan)

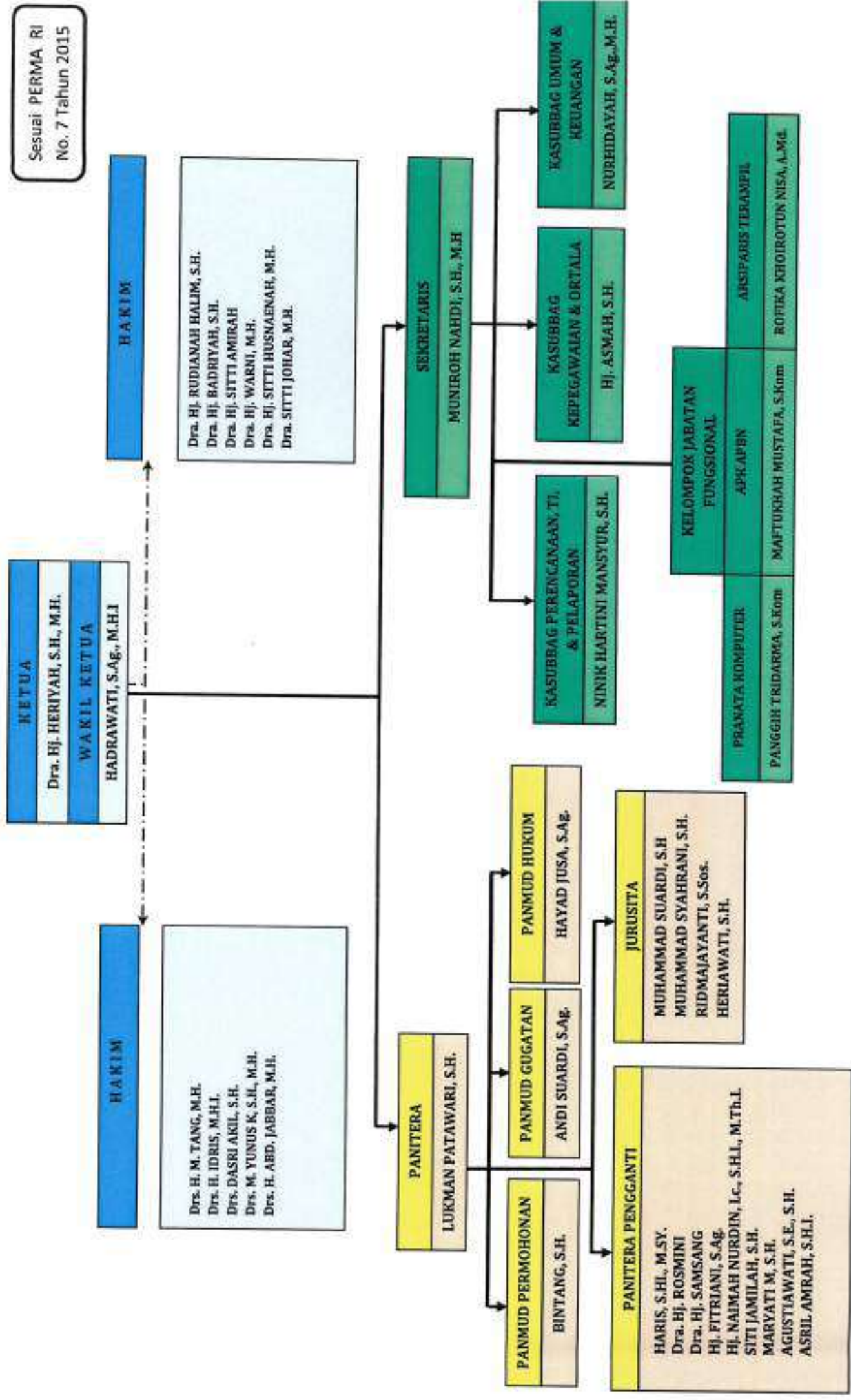


KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

HERIYAH



STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

— Garis Komando

- - - Garis Koordinasi



DAFTAR BEZETTING

Data Bezetting Pegawai di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			Nomor SK Golongan	JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. 196712311993032018	Pembina Utama Madya IV/d	2021-10-01	00077/KEP/AA/1500 1/21	Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Watampone	2022-08-31	248/KMA/SK/VIII/2022	S-2	
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. 197301311998022003	Pembina Utama Muda IV/c	2022-04-01	00013/KEP/AA/1500 1/22	Wakil Ketua Pengadilan, Pengadilan Agama Watampone	2022-12-07	339/KMA/SK/XI/2022	S-2	
3	Muniroh Nahdi, S.H., M.H. 196712101999032003	Pembina Tingkat I IV/b	2020-10-01	572/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020	Sekretaris, Sekretaris	2022-08-15	979/SEK/Kp.I/SK/VII/2022	S-2	
4	Lukman Patawari, S.H. 196907181998031003	Pembina IV/a	2021-04-01	1152/DJA/KP.04.1/SK/3/2021	Panitera Tingkat Pertama, Panitera	2022-12-07	3062/DJA/KP.04.6/SK/11/2022	S-1	
5	Dra. Hj. Badriyah, S.H. 195812311982032021	Pembina Utama Madya IV/d	2023-04-01	00045/KEP/AA/1500 1/23	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2021-08-27	154/KMA/SK/VIII	S-1	
6	Drs. H. Idris, M.H.I. 195812311985031051	Pembina Utama Madya IV/d	2019-04-01	00050/KEP/AA/1500 1/19	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-02-25	36/KMA/SK/I/2022	S-2	
7	Drs. H. M. Tang, M.H. 195812311987031030	Pembina Utama Madya IV/d	2018-10-10	00147/KEP/AA/1500 1/18	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2018-09-05	138/KMA/SK/VIII/2018	S-2	
8	Drs. Dasri Akil, S.H.	Pembina Utama	2018-10-01	00109/KEP/AA/1500	Hakim Tingkat	2019-05-	74/KMA/SK/IV/201	S-1	

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	195912311988031027	Madya IV/d		1/18	Pertama, Pengadilan Agama Watampone	28	9	
9	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. 196408201991031004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-01- 28	36/KMA/SK/I/2022	S-2
10	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. 196112311991031014	Pembina Utama Madya IV/d	2020-10-01	00072/KEP/AA/1500 1/20	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-12- 07	339/KMA/SK/XI/20 22	S-2
11	Dra. Hj. Sitti Amirah, 196602121994012001	Pembina Utama Madya IV/d	2022-03-16	00022/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2020-08- 31	181/KMA/SK/VII/20 20	S-2
12	Dra. Sitti Johar, M.H. 196607211994032002	Pembina Utama Madya IV/d	2022-10-01	00119/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-08- 29	248/KMA/SK/VIII/2 022	S-2
13	Dra. Hj. Musabillah, S.H., M.H. 196805111994032003	Pembina Utama Madya IV/d	2022-10-01	00094/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2023-08- 12	174/KMA/SK/IX/20 23	S-2
14	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. 196911241994032004	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00020/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2023-02- 21	24/KMA/SK/II/2023	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Dra. Hj. Wami, M.H. 196507271994012001	Pembina Utama Madya IV/d	2022-04-01	00012/KEP/AA/1500 1/22	Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Watampone	2022-02- 11	36/KMA/SK/I/2022	S-2
16	Blintang, S.H. 197009121992031004	Penata Tingkat I III/d	2012-10-01	392/SEK/KP.01/SK/9/ 2012	Penitera Muda, Panitera Muda Permoihan	2020-11- 03	2140/DJA/KP.04.6/ SK/9/2020	S-1
17	Hayed Jusa, S.Ag. 196708011992031003	Penata Tingkat I III/d	2016-10-01	2766/DJA/KP.04.1/SK /08/2016	Penitera Muda, Panitera Muda Hukum	2022-07- 25	1385/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
18	Andi Suardi, S. Ag. 197311052001121001	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0324/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Penitera Muda, Panitera Muda Gugatan	2022-08- 15	1960/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
19	Nurhidayah, S.Ag., M.H. 197807052002122001	Pembina IV/a	2018-04-01	443/SEK/Kp.1/SK/VI/2 019	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum dan Keuangan	2017-03- 06	5A/SEK/KP.1/SK/III/ 2017	S-2
20	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H. 198102052009012005	Pembina IV/a	2023-10-01	989/SEK/SK.KP2.1.1/I X/2023	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	2023-05- 04	526/SEK/Kp.1/SK/VI/ 2023	S-2
21	Hj. Asmah, S.H. 196611271987032001	Penata Tingkat I III/d	2015-04-01	W20- A/18/KP.04.1/III/201 5	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawain, Organisasi, dan Tata Laksana	2017-03- 06	5A/SEK/KP.1/SK/III/ 2017	S-1
22	Haris, S.H.I., M.Sv. 197304051998031004	Pembina IV/a	2020-10-01	1479/DJA/KP.04.1/SK /9/2020	Penitera Penganti, Panitera	2017-11- 16	1388/DJA/KP.04.6/ SK/10/2017	S-2

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Dra. Hj. Rosmini, 196704121954032002	Penata Tingkat I III/d	2006-04-01	UP-IV/1651/SEK/SK2 006	Panitera Pengganti, Panitera	2011-05- 05	0605/DJA/KP.04.6/ SK/III/2011	S-1
24	Siti Jamila, S.H., 196707282000122001	Penata Tingkat I III/d	2013-04-01	0499/DJA/KP.04.1/SK /II/2013	Panitera Pengganti, Panitera	2013-08- 23	0997/DJA/KP.04.6/ SK/IV/2013	S-1
25	Hj. Fitriani, S.Ag., 197410172001122002	Penata Tingkat I III/d	2014-04-01	0327/DJA/KP.04.1/SK /II/2014	Panitera Pengganti, Panitera	2021-05- 31	1685/DJA/KP.04.6/ SK/5/2021	S-1
26	Dra. Hj. Samsang, 196812312003122002	Penata Tingkat I III/d	2019-04-01	311 Tahun 2019	Panitera Pengganti, Panitera	2016-11- 29	3188/DJA/Kp.04.6/ SK/10/2016	S-1
27	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H., M.Th.I., 198209182009122003	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	1018/DJA/KP.04.1/SK /3/2022	Panitera Pengganti, Panitera	2020-03- 16	851/DJA/KP.04.6/S K/II/2020	S-2
28	Asri Amrah, S.H.I., 198910222012121001	Penata III/c	2021-04-01	906/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2021	Panitera Pengganti, Panitera	2023-03- 21	1068/DJA/KP.04.6/ SK/3/2023	S-1
29	Maryati M, S.H., 198601232012122004	Penata III/c	2021-04-01	892/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2021	Panitera Pengganti, Panitera	2022-07- 25	1968/DJA/KP.04.6/ SK/7/2022	S-1
30	Agustiawati, S.E., S.H., 198308082014082001	Penata Muda Tingkat I III/b	2020-10-01	1702/DJA/KP.04.1/SK /9/2020	Panitera Pengganti, Panitera	2023-03- 21	1105/DJA/KP.04.6/ SK/3/2023	S-1
31	Muhammad Syahrani, S.H., 197301012006041019	Penata Tingkat I III/d	2023-10-01	176/KMA/SK/IX/2023	Juru Sita, Panitera	2016-08- 09	1907/DJA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
32	Andi Muhammad Amin, S.H.I., 197706052009121002	Penata Tingkat I III/d	2022-04-01	W20- A/96/KP.04.1/SK/III/2 022	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	2023-10- 06	1842/SEK/SK.KP4.1. 3/X/2023	S-1
33	Maftukhah Mustafa, S.Kom., 198603242011012014	Penata Tingkat I III/d	2021-04-01	W20- A/115/KP.04.1/SK/III/ 2021	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2023-04- 27	475/SEK/Kp.I/SK/IV /2023	S-1

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Ridmajayanti, S.Sos. 199007092009122001	Penata III/c	2023-04-01	540/DJA/KP.04.1/SK/ 2/2023	Juru Sita, Panitera	2016-08-09	1905/DJA/KP.04.6/ SK/07/2016	S-1
35	Nanni, S.AN 198409172008012003	Penata Muda III/a	2022-10-01	823/1506/DKPSOM/I X/2022	Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2023-05-01	534/SEK/Kp.I/SK/V/ 2023	S-1
36	Panggih Tridarma, S.Kom. 199609022020121004	Penata Muda III/a	2020-12-01	1772/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris	2022-08-26	1004/SEK/Kp.I/SK/V III/2022	S-1
37	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H. 19950422202031006	Penata Muda III/a	2022-03-01	1663/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan	2023-03-01	264/SEK/Kp.I/SK/II/ 2023	S-1
38	Fathur Razak, S.Sy. 19931009202031005	Penata Muda III/a	2022-03-01	1662/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan	2023-03-01	264/SEK/Kp.I/SK/II/ 2023	S-1
39	Breend Benny Dharmawan, S.E. 19900805202031004	Penata Muda III/a	2022-03-01	3049/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	2023-03-01	264/SEK/Kp.I/SK/II/ 2023	S-2
40	Rofika Khoirotnun Nisa, A.Md. 199510162020122008	Pengatur II/c	2020-12-01	1773/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Arsiparis Pelaksana, Sekretaris	2022-08-26	1009/SEK/Kp.I/SK/V III/2022	D-III

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT			JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR
		Golongan	TMT Golongan	Nomor SK Golongan	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md. 199505022020121004	Pengatur II/c	2020-12-01	1774/SEK/CPNS.04.1/ SK/XII/2020	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	2021-12-01	W20- A/196/KP.00.3/SK/ XII/2021	D-III
42	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak 199905302022032008	Pengatur II/c	2022-03-01	1664/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	2023-03-01	W20- A/74/KP.00.3/SK/II/ 2023	D-III
43	Wahyuni Ista Aulia, A.Md 199608272022032015	Pengatur II/c	2022-03-01	3050/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan	2023-03-01	W20- A/71/KP.00.3/SK/II/ 2023	D-III
44	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B. 199905182022032012	Pengatur II/c	2022-03-01	3052/SEK/CPNS.04.1/ SK/II/2022	Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan	2023-03-01	W20- A/73/KP.00.3/SK/II/ 2023	D-III

Bone, 11 Desember 2023

Ketua Pengadilan Agama Watampone,

Dra. Hj. Henyiah, S.H., M.H.

NIP. 198712311993032018

Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT			PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Drs. Desri Akil, S.H.	195912311988031027	Hakim Tingkat Pertama	2019-05-28	35 tahun 9 bulan	IV/d	2018-10-01	STRATA I	STIH PENGAYOMAN	2006	
2	Drs. H. M. Tang, M.H.	195812311987031030	Hakim Tingkat Pertama	2018-09-05	36 tahun 9 bulan	IV/d	2018-10-10	PASCASARIAN A	WATAMPONE Universitas Hasanuddin Makassar	2007	
3	Drs. H. Idris, M.H.I.	195812311985031051	Hakim Tingkat Pertama	2022-02-25	38 tahun 9 bulan	IV/d	2019-04-01	PASCASARIAN A	Insitut Agama Islam Negeri Alauddin UjungPandang	2004	
4	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.	196112311991031014	Hakim Tingkat Pertama	2022-12-07	32 tahun 9 bulan	IV/d	2020-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013	
5	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	196712311993032018	Ketua Pengadilan	2022-08-31	30 tahun 9 bulan	IV/d	2021-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013	
6	Dra. Hj. Sitti Amirah,	196602121994012001	Hakim Tingkat Pertama	2020-08-31	29 tahun 11 bulan	IV/d	2022-03-16	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	2020	
7	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.	196408201991031004	Hakim Tingkat Pertama	2022-01-28	32 tahun 9 bulan	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR	2016	
8	Dra. Hj. Warni, M.H.	196507271994012001	Hakim Tingkat Pertama	2022-02-11	29 tahun 11 bulan	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	Universitas Muslim Indonesia	2010	
9	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.	196911241994032004	Hakim Tingkat Pertama	2023-02-21	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	2019	
10	Dra. Sitti Johar, M.H.	196607211994032002	Hakim Tingkat Pertama	2022-08-29	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-10-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	2017	

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT			PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	196805111994032003	Hakim Tingkat Pertama	2023-09-12	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013	
12	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	195812311982032021	Hakim Tingkat Pertama	2021-08-27	41 tahun 9 bulan	IV/d	2023-04-01	STRATA I	FAKULTAS HUKUM UNSAT MAKASSAR	1996	
13	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	197301311988022003	Wakil Ketua Pengadilan	2022-12-07	25 tahun 10 bulan	IV/c	2022-04-01	PASCASARIAN A	UIN Alaudin Makassar	2002	
14	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	196712101999032003	Sekretaris	2022-08-15	24 tahun 9 bulan	IV/b	2020-10-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	2016	
15	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	197807052002122001	Kepala Sub Bagian	2017-03-06	21 tahun 0 bulan	IV/a	2018-04-01	PASCASARIAN A	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	2016	
16	Haris, S.H.I., M.Sy.	197304051988031004	Panitera Pengganti	2017-11-16	25 tahun 9 bulan	IV/a	2020-10-01	PASCASARIAN A	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	2015	
17	Lukman Patawari, S.H.	196907181998031003	Panitera Tingkat Pertama	2022-12-07	25 tahun 9 bulan	IV/a	2021-04-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	1996	
18	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	198102052009012005	Kepala Sub Bagian	2023-05-04	14 tahun 11 bulan	IV/a	2023-10-01	PASCASARIAN A	Universitas Bosowa	2023	
19	Dra. Hj. Rosmini,	196704121994032002	Panitera Pengganti	2011-05-05	29 tahun 9 bulan	III/d	2006-04-01	STRATA I	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN LUUNG PANGANG	1991	
20	Bintang, S.H.	1970091219920310	Panitera Muda	2020-11-03	31 tahun	III/d	2012-10-01	STRATA I	Universitas 45	1999	

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
		04			9 bulan				Makassar	
21	Siti Jamila, S.H.	196707282000122001	Panitera Pengganti	2013-08-23	23 tahun 0 bulan	III/d	2013-04-01	STRATA I	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	1995
22	Andi Suardi, S. Ag.	197311052001121001	Panitera Muda	2022-08-15	22 tahun 0 bulan	III/d	2014-04-01	STRATA I	STAIN Watampone	2001
23	Hj. Fitriani, S.Ag.	197410172001122002	Panitera Pengganti	2021-05-31	22 tahun 0 bulan	III/d	2014-04-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	1999
24	Hj. Asmah, S.H.	196611271987032001	Kepala Sub Bagian	2017-03-06	36 tahun 9 bulan	III/d	2015-04-01	STRATA I	STIH PENGAYOMAN WATAMPONE	2010
25	Hayed Jusa, S.Ag.	196708011992033003	Panitera Muda	2022-07-25	31 tahun 9 bulan	III/d	2016-10-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	2000
26	Dra. Hj. Samsang.	196812312003122002	Panitera Pengganti	2016-11-29	20 tahun 0 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	Institut Agama Islam Negeri Watampone	1992
27	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	198603242011012014	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2023-04-27	12 tahun 11 bulan	III/d	2021-04-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	2009
28	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.	198209182009122003	Panitera Pengganti	2020-03-16	14 tahun 0 bulan	III/d	2022-04-01	PASCASARJANA	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN	2011
29	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	197706052009121002	Penyusun Laporan Keuangan	2023-10-06	14 tahun 0 bulan	III/d	2022-04-01	STRATA I	STAI DDI AD Mangkoso	2007

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT			PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
30	Muhammad Syahrani, S.H.	197301012006041019	Juru Sita	2016-08-09	17 tahun 8 bulan	III/d	2023-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	2009	
31	Maryati M, S.H.	198601232012122004	Panitera Pengganti	2022-07-25	11 tahun 0 bulan	III/c	2021-04-01	STRATA I	Universitas Hasanuddin Makassar	2008	
32	Asril Amrah, S.H.I.	198910222012121001	Panitera Pengganti	2023-03-21	11 tahun 0 bulan	III/c	2021-04-01	STRATA I	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DOI MANGKOSO	2011	
33	Ridmalavanti, S.Sos.	199007092009122001	Juru Sita	2016-08-09	14 tahun 0 bulan	III/c	2023-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimange alatung Bone, Watampone	2012	
34	Agustawati, S.E., S.H.	198308082014082001	Panitera Pengganti	2023-03-21	9 tahun 4 bulan	III/b	2020-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	2010	
35	Panggih Triderma, S.Kom.	199609022020121004	Pranata Komputer Anil Pertama	2022-08-26	3 tahun 0 bulan	III/a	2020-12-01	STRATA I	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2019	
36	Brend Benny Dharmawan, S.E.	199008052022031004	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	PASCASARJANA	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2014	
37	Fathur Razak, S.Sy.	199310092022031005	Analisis Perkara Peradilan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Watampone	2015	
38	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	199504222022031006	Analisis Perkara Peradilan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Darussalam Gontor	2019	

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Nanini, S.AN	198409172008012003	Analisis Tata Laksana	2023-06-01	15 tahun 11 bulan	III/a	2022-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Veteran Palopo, Palopo	2021
40	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	199505022020121004	Pengelola Barang Milik Negara	2021-12-01	3 tahun 0 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Universitas Jenderal Soedirman	2017
41	Rofika Kheirrotun Nisa, A.Md.	199510162020122008	Arsiparis Pelaksana	2022-08-26	3 tahun 0 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2017
42	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	199608272022032015	Pengelola Perkara	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	2017
43	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak	199905302022032008	Pengelola Barang Milik Negara	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Universitas Diponegoro	2020
44	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	199905182022032012	Pengelola Perkara	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2020



 Boni, 11 Desember 2023

 Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Watampone,

 Drs. Daeri Anji, S.H.,

 NIP. 495912311988031027

Daftar Urutan Senioritas (DUS) Hakim di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Drs. Dasri Akil, S.H.	195912311988031027	Hakim Tingkat Pertama	2019-05-28	35 tahun 9 bulan	IV/d	2018-10-01	STRATA I	PENGAYOMAN	2006
2	Drs. H. M. Tang, M.H.	195812311987031030	Hakim Tingkat Pertama	2018-09-05	36 tahun 9 bulan	IV/d	2018-10-10	PASCASARIAN A	Universitas Hasanuddin Makassar	2007
3	Drs. H. Idris, M.H.I.	195812311985031051	Hakim Tingkat Pertama	2022-02-25	38 tahun 9 bulan	IV/d	2019-04-01	PASCASARIAN A	Insitut Agama Islam Negeri Alauddin UjungPandang	2004
4	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.	196112311991031014	Hakim Tingkat Pertama	2022-12-07	32 tahun 9 bulan	IV/d	2020-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013
5	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	196712311993032018	Ketua Pengadilan	2022-08-31	30 tahun 9 bulan	IV/d	2021-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013
6	Dra. Hj. Sitti Amilah,	196602121994012001	Hakim Tingkat Pertama	2020-08-31	29 tahun 11 bulan	IV/d	2022-03-16	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	2020
7	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.	196408201991031004	Hakim Tingkat Pertama	2022-01-28	32 tahun 9 bulan	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR	2016
8	Dra. Hj. Warini, M.H.	196507271994012001	Hakim Tingkat Pertama	2022-02-11	29 tahun	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	Universitas Muslim	2010

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN			
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
					11 bulan				Indonesia		
9	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.	196911241994032004	Hakim Tingkat Pertama	2023-02-21	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	2019	
10	Dra. Sitti Johar, M.H.	196607211994032002	Hakim Tingkat Pertama	2022-08-29	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-10-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	2017	
11	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	196805111994032003	Hakim Tingkat Pertama	2023-09-12	29 tahun 9 bulan	IV/d	2022-10-01	PASCASARIAN A	Universitas 45 Makassar	2013	
12	Dra. Hj. Badriyah, S.H.	195812311982032021	Hakim Tingkat Pertama	2021-08-27	41 tahun 9 bulan	IV/d	2023-04-01	STRATA I	FAKULTAS HUKUM UNSAT MAKASSAR	1996	
13	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	197301311998022003	Wakil Ketua Pengadilan	2022-12-07	25 tahun 10 bulan	IV/c	2022-04-01	PASCASARIAN A	UIN Alaudin Makassar	2002	



 Bone,, 11 Desember 2023

 Ketua Pengadilan Agama Watampone,

 Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.,

 NIP. 196712311993032018

Daftar Urutan Senioritas (DUS) Panitia di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Haris, S.H.I., M.Sy.	197304051998031004	Panitera Pengganti	2017-11-16	25 tahun 9 bulan	IV/a	2020-10-01	PASCASARIAN A	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	2015
2	Lukman Patawari, S.H.	196907181998031003	Panitera Tingkat Pertama	2022-12-07	25 tahun 9 bulan	IV/a	2021-04-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	1996
3	Dra. Hj. Rosmini,	196704121994032002	Panitera Pengganti	2011-05-05	29 tahun 9 bulan	III/d	2006-04-01	STRATA I	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG	1991
4	Bintang, S.H.	197009121992031004	Panitera Muda	2020-11-03	31 tahun 9 bulan	III/d	2012-10-01	STRATA I	Universitas 45 Makassar	1999
5	Siti Jamila, S.H.	196707282000122001	Panitera Pengganti	2013-08-23	23 tahun 0 bulan	III/d	2013-04-01	STRATA I	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	1995
6	Andi Suardi, S. Ag.	197311052001121001	Panitera Muda	2022-08-15	22 tahun 0 bulan	III/d	2014-04-01	STRATA I	STAIN Watampone	2001
7	Hj. Fitriani, S.Ag.	197410172001122002	Panitera Pengganti	2021-05-31	22 tahun 0 bulan	III/d	2014-04-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	1999
8	Hayad Jusa, S.Ag.	196708011992031003	Panitera Muda	2022-07-25	31 tahun 9 bulan	III/d	2016-10-01	STRATA I	Universitas Muslim Indonesia Makassar	2000

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN			
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	Dra. Hj. Samsang.	196812312003122002	Panitera Pengganti	2016-11-29	20 tahun 0 bulan	III/d	2019-04-01	STRATA I	Institut Agama Islam Negeri Watampone	1992	
10	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H., M.Th.I.	198209182009122003	Panitera Pengganti	2020-03-16	14 tahun 0 bulan	III/d	2022-04-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN	2011	
11	Maryati M, S.H.	198601232012122004	Panitera Pengganti	2022-07-25	11 tahun 0 bulan	III/c	2021-04-01	STRATA I	Universitas Hasanuddin Makassar	2008	
12	Asril Amrah, S.H.I.	198910222012121001	Panitera Pengganti	2023-03-21	11 tahun 0 bulan	III/c	2021-04-01	STRATA I	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DDI MANGKOSO	2011	
13	Agustiawati, S.E., S.H.	198308082014082001	Panitera Pengganti	2023-03-21	9 tahun 4 bulan	III/b	2020-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	2010	



 Bontol, 11 Desember 2023

 Ketua Pengadilan Agama Watampone,

 Dra. Hj. Heriyan, S.H., M.H.,

 NIP. 196712311993032018

Daftar Urutan Senioritas (DUS) Jurusita di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		TINGKAT PENDIDIKAN	PENDIDIKAN	
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT		INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Muhammad Syahrani, S.H.	197301012006041019	Juru Sita	2016-08-09	17 tahun 8 bulan	III/d	2023-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum	2009
2	Ridmajayanti, S.Sos.	199007092009122001	Juru Sita	2016-08-09	14 tahun 0 bulan	III/c	2023-04-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimanigg alatung Bone, Watampone	2012



 Bone, 11 Desember 2023

 Ketua Pengadilan Agama Watampone,



 Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.,

 NIP. 196717311993032018

Daftar Urutan Senioritas (DUS) Kesekretariatan di Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	196712101999032003	Sekretaris	2022-08-15	24 tahun 9 bulan	IV/b	2020-10-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	2016
2	Nurhidayah, S.Ag., M.H.	197807052002122001	Kepala Sub Bagian	2017-03-06	21 tahun 0 bulan	IV/a	2018-04-01	PASCASARIAN A	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	2016
3	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	198102052009012005	Kepala Sub Bagian	2023-05-04	14 tahun 11 bulan	IV/a	2023-10-01	PASCASARIAN A	Universitas Bosowa	2023
4	Hj. Asmah, S.H.	196611271987032001	Kepala Sub Bagian	2017-03-06	36 tahun 9 bulan	III/d	2015-04-01	STRATA I	STIH PENGAYOMAN WATAMPONE	2010
5	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	198603242011012014	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2023-04-27	12 tahun 11 bulan	III/d	2021-04-01	STRATA I	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar	2009
6	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	197706052009121002	Penyusun Laporan Keuangan	2023-10-06	14 tahun 0 bulan	III/d	2022-04-01	STRATA I	STAI DDI AD Mangkoso	2007
7	Panggh Tridarma, S.Kom.	199609022020121004	Pranata Komputer Ahli Pertama	2022-08-26	3 tahun 0 bulan	III/a	2020-12-01	STRATA I	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Breend Benny Dharmawan, S.E.	199008052022031004	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	PASCASARIAN A	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2014
9	Fathur Razak, S.Sy.	199310092022031005	Analisis Perkara Peradilan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Watampone	2015
10	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	199504222022031006	Analisis Perkara Peradilan	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Darussalam Gontor	2019
11	Nanni, S.AN	198409172008012003	Analisis Tata Laksana	2023-06-01	15 tahun 11 bulan	III/a	2022-10-01	STRATA I	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Veteran Palopo, Palopo	2021
12	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	199505022020121004	Pengelola Barang Milik Negara	2021-12-01	3 tahun 0 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Universitas Jenderal Soedirman	2017
13	Rofika Khoirrotun Nisa, A.Md.	199510162020122008	Arsiparis Pelaksana	2022-08-26	3 tahun 0 bulan	II/c	2020-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2017
14	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	199608272022032015	Pengelola Perkara	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar	2017
15	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak	199905302022032008	Pengelola Barang Milik	2023-03-01	1 tahun	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Universitas Diponegoro	2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN			
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Negara		9 bulan						
16	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	199905182022032012	Pengelola Perkara	2023-03-01	1 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Semarang	2020	



 Bone,, 11 Desember 2023

 Ketua Pengadilan Agama Watampone,

 Dra. H. Heriyan, S.H., M.H.,

 NIP. 198712311993032018



DATA KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 307569
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/01/24 2:40 PM
Halaman : 1
Pig ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 4/1/24 7:17 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,976,935,000	2,806,276,000	2,617,635,840	0	2,617,635,840	93.21	180,640,360
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	48,000	40,000	35,534	393	35,141	89.83	4,859
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	226,943,000	168,000,000	155,977,522	0	155,977,522	92.84	12,022,478
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	48,459,000	39,500,000	38,359,124	0	38,359,124	92.05	3,140,876
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	40,320,000	44,000,000	40,860,000	540,000	40,320,000	92.86	3,680,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	5,464,980,000	4,234,000,000	3,971,250,000	470,000	3,970,780,000	93.79	263,220,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	991,634,000	671,000,000	633,986,350	0	633,986,350	94.48	37,013,650
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	116,658,000	105,775,000	100,764,020	0	100,764,020	95.26	5,010,980
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	357,720,000	369,225,000	377,524,000	0	377,524,000	96.99	11,701,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	22,385,000	24,000,000	21,305,000	0	21,305,000	88.77	2,695,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	385,800,000	245,700,000	228,150,000	0	228,150,000	92.86	17,550,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	11,636,862,000	8,729,516,000	8,183,847,190	1,010,393	8,182,836,797	93.75	546,679,203
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,636,862,000	8,729,516,000	8,183,847,190	1,010,393	8,182,836,797	93.75	546,679,203
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	786,222,000	792,954,000	792,954,000	0	792,954,000	100	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,698,000	525,000	525,000	0	525,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	94,092,000	88,842,000	98,842,000	0	98,842,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	4,280,000	4,194,000	4,187,000	1,727,000	2,460,000	99.83	1,734,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	890,302,000	886,515,000	886,508,000	1,727,000	884,781,000	100	1,734,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional	13,209,000	13,209,000	13,209,000	0	13,209,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	13,209,000	13,209,000	13,209,000	0	13,209,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5218	Belanja Barang Persediaan	22,464,000	40,687,000	40,686,750	0	40,686,750	100	250
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,464,000	40,687,000	40,686,750	0	40,686,750	100	250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218							
5221	Belanja Jasa	2,400,000	834,000	828,249	0	828,249	99.31	5,751
522112	Belanja Langganan Telepon	17,040,000	19,347,000	19,342,600	0	19,342,600	99.88	4,400
522113	Belanja Langganan Air	171,210,000	129,654,000	129,653,500	0	129,653,500	100	500
522141	Belanja Sewa	190,650,000	149,835,000	149,824,349	0	149,824,349	99.99	10,651
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
5231	Belanja Pemeliharaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 1900
SATUAN KERJA : 307509
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/01/24 2:40 PM
Halaman : 2
Prig ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 4/1/24 7:17 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,218,000	324,192,000	324,192,000	0	324,192,000	100	0
523118	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	78,300,000	78,300,000	78,300,000	0	78,300,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,976,000	99,851,000	99,850,911	0	99,850,911	100	89
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	486,494,000	502,343,000	502,342,911	0	502,342,911	100	89
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	51,340,000	51,340,000	51,338,800	0	51,338,800	100	1,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	51,340,000	51,340,000	51,338,800	0	51,338,800	100	1,200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,654,459,000	1,643,929,000	1,643,909,810	1,727,000	1,642,182,810	100	1,746,190
	JUMLAH BELANJA	13,281,341,000	10,373,445,000	9,827,757,000	2,737,393	9,825,018,607	94.74	548,425,393

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 005
: 04
: 1900
: 308076
: KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SULAWESI SELATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/01/24 2:42 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 4/1/24 7:17 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	867,000	867,000	867,000	0	867,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	867,000	867,000	867,000	0	867,000	100	0
5216	Belanja Barang Persediaan							
521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,500,000	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5216	3,500,000	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultansi	70,000,000	70,000,000	69,900,000	0	69,900,000	99.86	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	70,000,000	70,000,000	69,900,000	0	69,900,000	99.86	100,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103,587,000	103,590,000	103,587,000	0	103,587,000	100	3,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	103,587,000	103,590,000	103,587,000	0	103,587,000	100	3,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	183,357,000	183,357,000	183,254,000	0	183,254,000	99.94	103,000
	JUMLAH BELANJA	183,357,000	183,357,000	183,254,000	0	183,254,000	99.94	103,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I

: BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01

SATUAN KERJA

: PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307509

Tgl Data : 04/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 04/01/24 2:44 PM

Halaman : 1

lap_inface_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	8,105,000	16,060,212	7,955,212	22,875,000	9,863,310	13,211,590
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	8,105,000	16,060,212	7,955,212	22,875,000	9,863,310	13,211,590
B	BELANJA						
	BELANJA PEGAWAI	8,729,516,000	8,182,836,797	546,578,203	11,854,642,000	11,842,774,269	11,857,741
	BELANJA BARANG	1,643,929,000	1,642,182,810	1,746,180	1,765,274,000	1,765,281,332	12,668
	BELANJA MODAL	0	0	0	118,000,000	117,992,000	8,000
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307509

Tgl Data : 04/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/01/24 2:44 PM
Halaman : 2
lap_ina_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023			2022		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
		3	4	5	3	4	5
1	2						
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	10,373,445,000	9,825,019,607	548,425,393	13,537,916,000	13,526,027,591	11,858,409
C	PEMBIAYAAN						186

Keperangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I

: DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04

SATUAN KERJA

: PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

Tgl Data : 04/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 04/01/24 2:45 PM

Halaman : 1

lap_ina_face_eskwr_komperatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	303,578,000	161,776,000	(141,803,000)	53	211,307,000	171,137,500	40,169,500	81
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	303,578,000	161,776,000	(141,803,000)	53	211,307,000	171,137,500	40,169,500	83
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	183,357,000	183,254,000	103,000	100	222,553,000	222,520,870	32,130	100
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

Tgl Data : 04/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/01/24 2:45 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	183.357,000	183.254,000	103,000	100	222.563,000	222.520,870	32.130	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE





DATA INVENTARIS

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tgl Data : 04/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 04/01/24 10:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_salkr

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			BERURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS	NILAI	KUNJANTITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131111	Tanah		4,732	5,238,828,000	0	0	0	0	4,732	5,238,828,000	0	5,238,828,000	
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	1,308	1,406,704,000	0	0	0	0	1,308	1,406,704,000	0	1,406,704,000	
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3,424	3,832,124,000	0	0	0	0	3,424	3,832,124,000	0	3,832,124,000	
132111	Peralatan dan Mesin		649	2,725,508,218	19	113,094,000	0	0	669	2,838,602,218	0	2,838,602,218	
3020101003	Stasiun Wagon	Unit	2	337,314,828	0	0	0	0	2	337,314,828	0	337,314,828	
3020104001	Sepeda Motor	Unit	8	117,710,000	0	0	0	0	8	117,710,000	0	117,710,000	
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	69	182,498,200	0	0	0	0	69	182,498,200	0	182,498,200	
3050104002	Lemari Kayu	Buah	8	8,450,000	0	0	0	0	8	8,450,000	0	8,450,000	
3050104003	Rak Besi	Buah	1	3,795,000	0	0	0	0	1	3,795,000	0	3,795,000	
3050104004	Rak Kayu	Buah	2	150,000	0	0	0	0	2	150,000	0	150,000	
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000	0	1,000,000	
3050104007	Brandkasa	Buah	2	15,250,000	0	0	0	0	2	15,250,000	0	15,250,000	
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	4,500,000	0	0	0	0	5	4,500,000	0	4,500,000	
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	60,000,000	0	0	0	0	1	60,000,000	0	60,000,000	
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	15,240,000	0	0	0	0	4	15,240,000	0	15,240,000	
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000	0	4,000,000	
3050105048	Stempel Timbul/Bulat	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050105080	Mesin Anjutan	Buah	1	27,450,500	0	0	0	0	1	27,450,500	0	27,450,500	
3050105999	Peralatan Kantor Lainnya	dummy	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000	0	250,000	
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	84	184,400,800	7	8,909,000	0	0	77	175,309,800	0	171,309,800	
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	181	154,762,300	7	5,300,000	0	0	168	161,062,300	0	161,062,300	
3050201004	Kursi Kayu	Buah	12	11,400,000	0	0	0	0	12	11,400,000	0	11,400,000	
3050201005	Sofa	Buah	5	49,017,500	0	0	0	0	5	49,017,500	0	49,017,500	
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	12,980,000	0	0	0	0	2	12,980,000	0	12,980,000	
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000	0	300,000	
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	9,998,000	0	0	0	0	2	9,998,000	0	9,998,000	
3050201017	Skensel	Buah	2	8,745,000	0	0	0	0	2	8,745,000	0	8,745,000	
3050201020	Kursi Fiber/Glas/Plastik	Buah	7	13,332,500	0	0	0	0	7	13,332,500	0	13,332,500	
3050202003	Jam Elektronik	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3050203003	Mesin Pemotong Rumpul	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000	0	1,000,000	
3050204001	Lemari Es	Buah	7	9,800,000	0	0	0	0	7	9,800,000	0	9,800,000	
3050204004	A.C. Split	Buah	19	97,948,000	0	0	0	0	19	97,948,000	0	97,948,000	
3050204008	Kipas Angin	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000	0	500,000	
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000	0	200,000	
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000	0	250,000	
3050206002	Televisi	Buah	6	34,910,000	0	0	0	0	6	34,910,000	0	34,910,000	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tgl Data : 04/01/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 04/01/24 10:37 AM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_gab_saker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023			
			BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000	0	0	0	0	0	0	4	41,736,000	0	0
3050206008	Sound System	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206014	Microphone	Buah	7	3,848,150	0	0	0	0	0	0	7	3,848,150	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	45,000	0	0	0	0	0	0	2	45,000	0	0
3050206027	Lambang Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	68,000	0	0	0	0	0	0	2	68,000	0	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	1,080,000	0	0	0	0	0	0	6	1,080,000	0	0
3050206034	Tiangga Aluminium	Buah	1	2,992,000	0	0	0	0	0	0	1	2,992,000	0	0
3050206036	Kaca Hias	Buah	6	3,248,400	0	0	0	0	0	0	6	3,248,400	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	0	0	1	1,350,000	0	0
3050206040	Pelu Siding	Buah	2	14,000	0	0	0	0	0	0	2	14,000	0	0
3050206042	Lambang Insanrel	Buah	1	4,174,500	0	0	0	0	0	0	1	4,174,500	0	0
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	0	0
3050206060	Arbak Tinggi	Buah	4	2,000,000	0	0	0	0	0	0	4	2,000,000	0	0
3050206090	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620	0	0	0	0	0	0	1	2,155,620	0	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	43,000	0	0	0	0	0	0	1	43,000	0	0
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500	0	0	0	0	0	0	1	16,483,500	0	0
3060101049	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	31,170,520	0	0	0	0	0	0	7	31,170,520	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	1	10,844,900	0	0	0	0	0	0	1	10,844,900	0	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	25,518,900	0	0	0	0	0	0	1	25,518,900	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	22,455,000	0	0	0	0	0	0	1	22,455,000	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	350,000	0	0	0	0	0	0	1	350,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060347002	Geniset	Buah	1	149,985,000	0	0	0	0	0	0	1	149,985,000	0	0
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	0	0	0	0	0	0	1	17,840,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	32	412,040,910	1	35,195,000	0	0	0	0	33	447,235,910	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	31	382,845,000	2	25,000,000	0	0	0	0	33	407,845,000	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	23,839,800	0	0	0	0	0	0	9	23,839,800	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	9,999,000	2	39,700,000	0	0	0	0	3	49,699,000	0	0
3100204001	Server	Buah	2	140,410,000	0	0	0	0	0	0	2	140,410,000	0	0
3100204002	Router	Buah	3	12,474,000	0	0	0	0	0	0	3	12,474,000	0	0
3100204014	Rak Server	Buah	2	18,228,590	0	0	0	0	0	0	2	18,228,590	0	0
3100204021	Kabel UTP	Buah	3	4,950,000	0	0	0	0	0	0	3	4,950,000	0	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	2	880,000	0	0	0	0	0	0	2	880,000	0	0
3100204024	Switch	Buah	6	4,950,000	0	0	0	0	0	0	6	4,950,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		10	7,779,555,000	0	19,988,100	0	0	0	0	9	7,799,544,100	0	0
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	6,095,150,000	0	19,988,100	0	0	0	0	1	6,115,138,100	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Tgl Data : 04/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 04/01/24 10:37 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_salker

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307609 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

KODE		URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023				MUTASI				BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	Unit	2	517.731,000	0	0	0	0	2	517.731,000	0	0	11	
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	Unit	2	44.702,000	0	0	0	0	2	44.702,000	0	0		
40101132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	Unit	1	109.033,000	0	0	0	0	1	109.033,000	0	0		
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	Unit	3	720.981,000	0	0	0	0	3	720.981,000	0	0		
4040104001	Pagar Permanen	Unit	Unit	1	292.059,000	0	0	0	0	1	292.059,000	0	0		
134113	Jaringan			1	19.988,100	0	0	1	19.988,100	0	0	0	0		
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	dummy	1	19.988,100	0	0	1	19.988,100	0	0	0	0		
135121	Aset Tetap Lainnya			456	15.354,879	0	0	0	0	456	15.354,879	0	0		
6010101001	Monografi	Buah	Buah	444	14.431,989	0	0	0	0	444	14.431,989	0	0		
6010101002	Referensi	Buah	Buah	5	357,990	0	0	0	0	5	357,990	0	0		
6010102002	Majalah	Buah	Buah	6	90,000	0	0	0	0	6	90,000	0	0		
6010102004	Laporan	Buah	Buah	3	75,000	0	0	0	0	3	75,000	0	0		
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	dummy	8	400,000	0	0	0	0	8	400,000	0	0		
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050105009	Papan Visual/Papan Nama	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050105017	Mesin Absensi	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050105046	Sampel Timbul/Bulat	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050202003	Jam Elektronik	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050204001	Lemari Es	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050204004	A.C Split	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3050206008	Sound System	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3060102128	Camera Digital	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3060201010	Facsimile	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100102001	P.C Unit	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100102002	Lap Top	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010112001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040104001	Pagar Permanen	Unit	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL					15,779,334,997		133,082,100		19,988,100		15,892,428,997				



LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl Data : 04/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 04/01/24 2:46 PM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_saklar

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI					SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
			BERTAMBAH		BERKURANG						
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 307509 **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Tgl Data : 09/01/24 6:00 AM
Tanggal : 09/01/24 10:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	291,000
1010301006	Ordner Dan Map	41,800
1010301007	Penggaris	28,000
1010302001	Kertas HVS	216,000
1010305010	Batu Baterei	50,000
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	42,000
Jumlah Barang Konsumsi		668,800
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010306008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	120,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		120,000
TOTAL		788,800

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 309076 **PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Tgl Data : 09/01/24 6:00 AM
Tanggal : 09/01/24 10:24 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,055,074
Jumlah Barang Konsumsi		2,055,074
TOTAL		2,055,074

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 307509 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl.Data : 04/01/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 04/01/24 10:36 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	668,800
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	120,000
131111	Tanah	5,238,828,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,809,749,068
133111	Gedung dan Bangunan	7,799,644,100
135121	Aset Tetap Lainnya	15,354,679
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,339,798,086)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,071,468,093)
J U M L A H		12,453,098,468

Watampone, 4 Januari 2024
Penasihat Hukum UAKPB
SEKRETARIS

MUNIROH NAHDI, S.H.,M.H.
196712101993032003

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309076 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Tgl.Data : 04/01/24 12:00 PM
Tgl.Cetak : 04/01/24 2:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	2,055,074
JUMLAH		2,055,074

Watampone, 4 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS

MUNIROH NAHDI, S.H.,M.H.
196712101999032003



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 P.A. Watampone



SK PETUGAS PTSP



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 139/KPA.W20-A2/HK2.6/IX/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terintegrasi yang mudah pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Watampone;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

- Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/H/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Nomor 1403. b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/115/OT.00/SK/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023;
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 NOMOR : 139/KPA.W20.A2/HK2.6/IX/2023
 TANGGAL : 01 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H	Ketua	Pengarah
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah
3	Lukman Patawari, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
4	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris	
5	Andi Suardi, S.Ag.	Panmud Gugatan	Pelaksana
6	Bintang, S.H.	Panmud Permohonan	
7	Hayad Jusa, S.Ag.	Panmud Hukum	
8	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Kasir
9	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Petugas Pendaftaran Perkara
10	Andi Ulfyah Nur, S.Si.	Honorar	Petugas Pendaftaran Perkara
11	Iriani, S.H.	Honorar	Petugas Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
12	Hermawati, S.H.	Honorar	Petugas Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
13	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengelola Perkara	Petugas Penyerahan Produk
14	Nur Islah Ugie Patawari, S.H.	Honorar	Petugas Penyerahan Produk
15	Dyta Nurul Yunus, S.H.	Honorar	Petugas Pojok Ecourt dan Pelayanan
16	Abdul Muhaemin, S.Fil	Honorar	Petugas Pojok Ecourt dan Pelayanan
17	Nurul Indryana Wahid, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Petugas Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)

18	Fathur Razak, S.Sy.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)
19	Muh. Haerul Huluk, S.H.I.	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
20	Ahmad Amiruddin, S.Sy	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
21	M. Amin Firdaus, S.E.I.	Honorar	Petugas Antrian
22	Sri Astuti Ana Darwis, S.H.	Honorar	Petugas Duta Layanan/Resepsionis

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 139/KPA.W20-A2/HK2.6/IX/2023
TANGGAL : 01 September 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA DAN PETUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

1. Pengarah bertugas :

- Membentuk tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengarahkan, membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh aparat pengadilan;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengawasi dan mengevaluasi, membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Penanggungjawab bertugas :

- Membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim pejabat dan pegawai pengadilan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelola dengan baik;
- Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Pelaksana bertugas :

- Mengatur jadwal petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengoreksi hasil kerja petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Petugas bertugas :

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



SK HAWASBID



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR 143/KPA.W20-A2/PW1.1/IX/2023
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif dan responentif Pengadilan Agama Watampone, maka dipandang perlu menunjuk Hakim Pengawas Bidang Peradilan Agama Watampone;
 - b. Bahwa nama-nama Hakim pada Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu diberi tugas Hakim Pengawas Bidang dimaksud di atas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/1994 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

- KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE NOMOR W20-A2/114/PS.00/SK/IV/2023 TANGGAL 3 APRIL 2023 TENTANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA WATAMPONE;
- KESATU** : Menunjuk Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Watampone;
- KEDUA** : Tugas Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, sehingga kegiatan dilaksanakan dengan seksama dan mencapai hasil sesuai yang diharapkan;
- KETIGA** : Uraian tugas masing-masing Pengawas Bidang akan disusun sesuai lampiran;
1. Manajemen Peradilan :

- a. Program Kerja
- b. Pelaksanaan/pencapaian target
- c. Pengawasan dan Pembinaan
- d. Kendala dan hambatan
- e. Faktor-faktor yang mendukung
- f. Evaluasi kegiatan
2. Administrasi Perkara :
 - a. Prosedur penerimaan perkara
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali
 - e. Keuangan perkara
 - f. Pemberkasan perkara dan kearsipan
 - g. Pelaporan
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan :
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis Hakim
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
 - c. Minutasi perkara
 - d. Pelaksanaan putusan (eksekusi)
4. Administrasi Umum :
 - a. Kepegawaian
 - b. Keuangan
 - c. Inventaris
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran
 - e. Pemanfaatan Teknologi Informasi
5. Kinerja pelayanan publik :
 - a. Pengelolaan manajemen
 - b. Mekanisme pengawasan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 - e. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan

KEEMPAT

: Hakim Pengawas Bidang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone sebagai Koordinator Pengawas;

KELIMA

: Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan dan rapat evaluasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Pengawas Bidang setiap triwulan sesuai dengan Lamporan II Keputusan ini. Selanjutnya mengupayakan solusi pemecahan terhadap kendala yang dihadapi dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone;

KEENAM

: Koordinator dan Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan petunjuk Ketua Pengadilan Agama Watampone;

KETUJUH

: Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 13 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



PHERYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 NOMOR : 143/KPA.W20-A2/PW1.1/IX/2023
 TANGGAL : 13 September 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA TAMU (RESEPSIONIS)
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

NO	BIDANG PENGAWASAN	NAMA/ NIP	SEKRETARIS
	Koordinator Hakim Pengawas Bidang	Hadrawati, S.Ag., M.H.I. NIP. 19730131 199802 2 003	Abdul Muhaemin
1.	Manajemen Peradilan	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. NIP. 19691124 199403 2 004 Dra. Hj. Sitti Amirah NIP. 19611002 198803 2 001	Zelvyana M. Amin Firdaus
2.	Administrasi Perkara	Dra. Hj. Badriyah, S.H. NIP. 19581231 198203 2 021 Drs. M. Yunus K., S.H., M.H. NIP. 19611231 199103 1 014	Ahmad Amiruddin
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan	Drs. H. Idris, M.H.I. NIP. 19581231 198503 1 051	Iriani Muh.Haerul Huluk
4.	Administrasi Umum	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. NIP. 19680511 1994032003 Drs. Dasri Akil, S.H. NIP. 19591231 198803 1 027	A. Ulfiyah Nur Satriani
5.	Kinerja pelayanan publik	Drs. H. Muh. Tang, M.H. NIP. 19581231 198703 1 030 Dra. Hj. Warni, M.H. NIP. 19650727 199401 2 001	Dyta Nurul Yunus Hermawati

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 REPUBLIK INDONESIA


 HERIYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 NOMOR : 143/KPA.W20-A2/PW1.1/IX/2023
 TANGGAL : 13 September 2023

**JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN
 HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

No.	Bidang Pengawasan	Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Manajemen Peradilan			✓			✓			✓			✓
2.	Administrasi Perkara			✓			✓			✓			✓
3.	Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan			✓			✓			✓			✓
4.	Administrasi Umum			✓			✓			✓			✓
5.	Kinerja pelayanan publik			✓			✓			✓			✓

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 REPUBLIK INDONESIA



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 139/KPA.W20-A2/HK2.6/IX/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi terintegrasi yang mudah pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Watampone;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

- Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/H/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/DjA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Lingkungan Peradilan Agama;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Nomor 1403. b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/115/OT.00/SK/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone Tahun 2023

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023;
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Watampone sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 September 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
 NOMOR : 139/KPA.W20-A2/HK2.6/EX/2023
 TANGGAL : 01 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H	Ketua	Pengarah
2	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah
3	Lukman Patawari, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
4	Muniroh Nahdi, S.H., M.H.	Sekretaris	
5	Andi Suardi, S.Ag.	Panmud Gugatan	Pelaksana
6	Bintang, S.H.	Panmud Permohonan	
7	Hayad Jusa, S.Ag.	Panmud Hukum	
8	Nur Fauzi Radliatul Fatah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Kasir
9	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Petugas Pendaftaran Perkara
10	Andi Ulfyah Nur, S.Si.	Honorar	Petugas Pendaftaran Perkara
11	Iriani, S.H.	Honorar	Petugas Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
12	Hermawati, S.H.	Honorar	Petugas Informasi dan Pengaduan (Operator Siwas)
13	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengelola Perkara	Petugas Penyerahan Produk
14	Nur Islah Ugie Patawari, S.H.	Honorar	Petugas Penyerahan Produk
15	Dyta Nurul Yunus, S.H.	Honorar	Petugas Pojok Ecourt dan Pelayanan
16	Abdul Muhaemin, S.Fil	Honorar	Petugas Pojok Ecourt dan Pelayanan
17	Nurul Indryana Wahid, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara	Petugas Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)

18	Fathur Razak, S.Sy.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Pengembalian Sisa Panjar (Kasir)
19	Muh. Haerul Huluk, S.H.I.	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
20	Ahmad Amiruddin, S.Sy	Honorar	Petugas Gugatan Mandiri
21	M. Amin Firdaus, S.E.I.	Honorar	Petugas Antrian
22	Sri Astuti Ana Darwis, S.H.	Honorar	Petugas Duta Layanan/Resepsionis

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 139/KPA.W20-A2/HK2.6/IX/2023
TANGGAL : 01 September 2023

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGARAH, PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA DAN PETUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2023**

1. Pengarah bertugas :

- Membentuk tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengarahkan, membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh aparat pengadilan;
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengawasi dan mengevaluasi, membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Penanggungjawab bertugas :

- Membentuk dan mengoperasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyediakan sarana prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim pejabat dan pegawai pengadilan agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikelola dengan baik;
- Berkoordinasi dan memberi petunjuk kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meminta laporan pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku pengarah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Pelaksana bertugas :

- Mengatur jadwal petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memberikan dokumen data dan informasi kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyusun laporan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengoreksi hasil kerja petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya;
- Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Petugas bertugas :

- Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
- Memberikan informasi dan petunjuk kepada pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggungjawab kepada pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA



FOTO-FOTO KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



APEL SENIN PAGI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



APEL SENIN PAGI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



APEL JUMAT SORE

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



UPACARA PERINGATAN HARI NASIONAL